

**SKRIPSI**  
***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN PROGRAM**  
**KOTA TANPA KUMUH ( KOTAKU )**  
**DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh:

**AGUSSALIM**

**105640194414**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2020**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
KOTA TANPA KUMUH ( KOTAKU )  
DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

AGUSSALIM

Nomor Stambuk : 105640194414

17/02/2020

1 cap  
Smb. Alumni

R/024/IPM/2020

AGU

e1

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan  
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di  
Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Nama Mahasiswa : Agussalim


Nomor Stambuk : 10564 01 94414

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahir, M.Si



Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ithyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 007/FSP/A.3-VIII/II/41/2020 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa, 04 Februari 2020.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

### Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)

2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si

3. Ahmad Taufik, S.IP, M.AP

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agussalim  
Nomor Stambuk : 10564 0192 51 4  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah Hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 27 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Agussalim



## ABSTRAK

**Agussalim, *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kecamatan Tallo Kota Makassar (dibimbing oleh Muhammad Tahir, dan Andi Luhur Prianto)**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Desain penelitian studi kasus, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi wawancara langsung terhadap informan berjumlah 8 (delapan) orang yang dianggap mampu memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta data lainnya berupa dokumentasi yang dianggap mendukung. Kemudian data tersebut dikumpul disusun secara jelas dan sistematis dalam rangka menyusun skripsi dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah berjalan dengan baik dimana semua pihak yang ada dalam *colaborasi* hal ini ditandai dengan telah berjalannya program KOTAKU dalam penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada dalam Kelurahan Kaluku Bodoa.

**Kata kunci :** *Collaborative Governance*, Pelaksanaan, KOTAKU

## KATA PENGANTAR



**“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah, dan InayaNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat ayahanda **Dr. Muhammad Tahir, M.Si** selaku pembimbing I dan ayahanda **Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun konsepsional dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda **Ismail** dan Ibunda **Suriani** yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan motivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa

kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis hanturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos., M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Kakanda AL-Muhajir Haris, S.IP., M.IP yang telah mendampingi dalam penyusunan proposal dan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh jajaran staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administratif .
6. Kawan-kawan Jurusan Ilmu Pemerintahan '14 terkhusus IP B sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis.
7. Terimak kasih juga kepada kakanda Surianto B S.IP, Zulkarnai S.IP, Ahmad Efendi S.IP dan kakanda Andi Muh Agus S.IP yang telah membantu saya dan selalu memotivasi saya dalam mengerjakan Skripsi ini mulai dari tahapan awal dan sampai tahap penyelesaian.



Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Dan oleh itu saran, kritik serta umpan balik diharapkan agar skripsi ini mendekati kesempurnaan. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesaikannya skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.Amin ...!!

Makassar, 27 Januari 2020

Penulis

Agussalim

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENERIMAAN TIM.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Konsep Collaborative Governance.....	10
C. Permukiman Kumuh.....	18
D. Kerangka Pikir.....	25
E. Fokus Penelitian.....	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	30

E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Keabsahan Data. ....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskrip atau Karakteristik Objek Penelitian .....	37
B. Bentuk <i>Collaborative Governance</i> dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar..	48
C. Peran Pelaku Program Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perumahan dan pemukiman di Indonesia khususnya di perkotaan tidak terlepas dari adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan di kota. Perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur kota. Perubahan tersebut akan mengarah pada kemerosotan suatu lingkungan permukiman, tidak efisiennya penggunaan tanah kawasan pusat kota, dan mengungkapkan bahwa penurunan kualitas tersebut bias terjadi disetiap bagian kota ( Dahlan, 2016 ).

Kepadatan penduduk yang terus meningkat utamanya di wilayah perkotaan akan mempengaruhi kualitas kota yaitu pada penghasilan limbah serta pencemaran lingkungan akibat ulah mereka. Sifat seperti ini akan menghasilkan kecenderungan untuk membuat tempat tinggal disembarang tempat, hal ini Karena pola hidup mereka cenderung tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang kemudian akan mengancam kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Kecenderungan untuk melakukan urbanisasi tanpa adanya pendampingan akan mengakibatkan kebutaan ketika berada di wilayah perkotaan, hal inilah yang akan membuat mereka cenderung untuk menempati suatu wilayah tanpa memikirkan dampak dari yang mereka lakukan ( Lailla, 2014 ). Urbanisasi sebagai suatu proses perubahan kehidupan dan tempat bagi terwujudnya masyarakat dan bentuk perkotaan yang akan menciptakan keberagaman atau heterogenitas baik dalam kota maupun dalam skala wilayah, (Soetomo,2009).

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah beserta kondisi hunian masyarakat dalam kawasan tersebut sangat buruk. Rumah beserta sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik pada standar kebutuhan, persyaratan rumah sehat, kepadatan bangunan, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya

Kehadiran pemukiman kumuh erat kaitannya dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan infrastruktur-nya. Hal ini berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan, penurunan tingkat kesehatan masyarakat, penurunan kualitas pelayanan sarana dan prasarana, serta meningkatkan resiko kerawanan dan konflik sosial. Oleh karena itu, pemukiman kumuh segera harus ditangani, paling tidak luas pemukiman kumuh harus dapat dihentikan, keberadaan lingkungan kumuh yang sekarang ada harus sedikit demi sedikit diubah menjadi lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak huni, aman, serasi, sehat dan teratur (Noegroho, 2012).

Permukiman kumuh biasanya dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, miskin, tidak memadai, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak aman, kotor, dibawah standar, tidak sehat dan masih banyak tanggapan negatif lainnya (Rahardjo, 2010). Sedangkan menurut Endang dalam Prasetyo (2009) mengatakan bahwa permukiman kumuh (*slum*) adalah sekelompok bangunan disuatu daerah yang dicirikan oleh keburukan-keburukan yang berlebihan, kondisi kurang sehat, kurang fasilitas, jiwa dan moral.



Perturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Hal inipun diperkuat dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal Ini mengharuskan setiap kepala Daerah untuk menjalankan program KOTAKU untuk penanganan permukiman kumuh didaerahnya.

Pada tahun 2016 telah diluncurkan sebuah program untuk mencegah permukiman di wilayah perkotaan melalui Program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh ) yang merupakan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional dengan sasaran tercapainya permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dengan tujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan ( Yolanda, 2017 ).

Kota tanpa kumuh ( KOTAKU ) adalah salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengembangkan ifrastruktur di Indonesia. Adapun peningkatan infrastruktur ini adalah upaya pemerintah untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang berada di permukiman yang tidak layak huni. Adapun hal ingin dicapai

adalah Jalan lingkungan, Penyediaan air minum, Drainase lingkungan, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan sampah, Pengamanan kebakaran, Ruang terbuka hijau.

Melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor : 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama dalam penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan keswadayaan Masyarakat (BKM). Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Makassar adalah sebuah Kota yang memiliki peningkatan pertumbuhan dan penembangunan pembangunan yang semakin maju. Dengan semakin berkembangnya semua aspek pembangunan juga ikut menimbulkan berbagai implikasi yang menyangkut industry, mobilitas manusia yang terus meningkat, diskonkurensi masalah kependudukan terhadap daya dukung yang makin melebar, juga dengan adanya peningkatan penduduk. Dengan hal tersebut kebutuhan terhadap kawasan perumahan permukiman yang semakin besar dengan lahan yang semakin terbatas menciptakan perbukitan kumuh yang besar.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Makassar menyebabkan kebutuhan akan perumahan dan penggunaan lahan semakin bertambah. Berbagai permasalahan yang terjadi akibat peningkatan kawasan permukiman kumuh adalah tidak tertata dengan baik, semakin berkurangnya lahan permukiman, tempat tinggal seadanya, tidak layak huni serta kehidupan penduduknya masih sangat dibawah standar Sehingga di perlukan sebuah program yang mengatasi permasalahan permukiman kumuh di kota Makassar (Radar Makassar, 2017).

Kota Makassar merupakan salah satu Kota yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU karena masih banyak kawasan permukiman kumuh yang diberikan perhatian. Luas permukiman kumuh di kota Makassar menapai 47,62 kilometer persegi yang berada hamper semua kecamatan. Besaran luas kawasan permukiman kumuh berbeda-beda, tetapi kawasan yang paling luas berada di Kecamatan Tallo, Mariso, Tamalate. Kawasan Kelurahan Kalukubodoa merupakan salah satu daerah yang mendapatkan Program KOTAKU, kawasan Kelurahan Kalukubodoa memiliki permasalahan ketidak teraturan bangunan serta sarana infrastruktur dasar masyarakat yang juga msih kurang seperti MCK pribadi yang masih belum mereka miliki.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah sehingga perlunya sebuah kolaborasi dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang berkolaborasi diharapkan dapat memberikan sebuah pengaruh positif diantaranya meningkatkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kota yang layak huni bagi masyarakat serta meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat

dalam memanfaatkan dan memelihara apa yang sudah berhasil dibangun, (SEDCJCK No.40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh).

Dalam Sebuah kolaborasi pasti tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Sulitnya menentukan waktu yang tepat karena banyaknya *stakeholder* yang terlibat, menjalin komunikasi antar instansi tidaklah mudah, biasanya terjadi permasalahan komunikasi antar unit pelaksanaan program karena komitmen yang tidak sama dalam rapat. Maka dari itu pemilihan aktor juga menjadi hal yang penting didalam proses kolaborasi, mengungkapkan kepentingan aktor serta keterlibatan mereka dalam kolaborasi menjadi salah satu hal penting untuk melihat dampak yang ditimbulkan, apakah nantinya akan terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi Proses kolaborasi. (Arrozraq, 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas sehingga penulis tertarik mengangkat judul tentang “ ***Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kecamatan Tallo Kota Makassar**”. Saya ingin melihat bagaimana Bentuk *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar, serta bagaimana Bagaimana Peran Pelaku Program Dalam *Collaborative Governance* Pada Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, kajian ini akan di fokuskan dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar?
2. Bagaimana Peran Pelaku Program Dalam *Collaborative Governance* Pada Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar ?

## C. Tujuan Penelitian

Diketahui bahwa usaha maupun kegiatan, apapun mempunyai tujuan yang hendak ingin dicapai. Oleh karena itu tujuan ini akan memberikn manfaat dan penyelesaian dari peneliti yang di laksanakan. Adapun yang menjadi tujuan penilitian ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pelaku Program Dalam *Collaborative Governance* Pada Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar?

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang



*Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir mahasiswa-mahasiswi khususnya tentang berbagai konsep dan teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan dapat pula memberikan sumbangsi pemikiran tentang *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Fitriani, (2018). Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa kolaborasi akan berjalan efektif apabila pihak-pihak yang berkolaborasi berpegang teguh pada prinsip kolaborasi, Keseriusan dalam berkolaborasi harus diikuti dengan keterlibatan secara penuh mulai dari awal sampai pelaksanaan kegiatan. Masyarakat yang menjadi unsur penting dalam program KOTAKU harus ikut berpartisipasi baik itu pikiran, tenaga, dan finansial. Serta transparansi persoalan dana secara mendetail dan tertulis agar mampu dilihat semua pihak agar tercipta kepercayaan antara satu sama lain.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Yuliani Dkk, (2017) . Dalam penelitiannya mengatakan bahwa penetapan kolaborasi dalam program KOTAKU sangat penting tetapi juga harus dibarengi dengan menjalankan konsep kolaborasi itu sendiri. Program KOTAKU sendiri tidak akan berjalan semestinya apabila salah satu dari konsep kolaborasi tidak dijalankan, salah satu contoh adalah tanggung jawab setiap unsur untuk komit dalam proses mulai tahap pertama sampai akhir, dan komunikasi harus berjalan agar kehadiran pihak-pihak yang lain dapat diterima.

Hafidzita, (2018). Dalam penelitiannya mengatakan Partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU sangat diperlukan agar semua pihak dalam masyarakat dapat terlibat, dan mendukung tercapainya program tersebut. Masyarakat harus dilibatkan mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program,

pengambilam manfaat, dan evaluasi program agar masyarakat tau dan mampu memposisikan dirinya dimana dan kapan mereka dibutuhkan.

Rohimat Dkk, (2017). Dalam penelitiannya Mengatakan bahwa peran serta dari pihak ketiga dalam program KOTAKU sangat penting, selain dari proses awal sampai selesainya program tersebut selesai. juga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan permukiman mereka, apabila masyarakat acuh tak acuh dengan selesainya program ini maka tidaklah mungkin permukiman yang mereka tinggali akan kembali kumuh dan tidak layak huni.

Dari pemaparan penelitan terdahulu di atas dapat kita simpulkan bahwa kolaborasi sangat diperlukan dalam program KOTAKU baik mulai dari proses atau tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian, tetapi semua itu akan percuma apabila tidak dibarengi dengan pelestarian dan perawatan dari masyarakat itu sendiri.

## **B. Konsep Collaborative Governance**

Secara filosofis *Collaborative* adalah upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Herley dan Bisman dalam Arrozzaq (2016:5), mengatakan bahwa *Collaborative* adalah upaya penyatuan dan menciptakan kepercayaan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. *Collaborative* membutuhkan berbagai macam pihak stakeholder maupun organisasi yang saling bahu menbahu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Samatupang Dan Sridharna dalam Arrozzaq (2016:5), *Collaborative* adalah upaya mempersatukan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai

masalah, menciptakan solusi terhadap masalah tersebut, dan mengedepankan nilai nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Menurut Bateman (2009), Kolaborasi merupakan praktek kerjasama dimana individu bekerja sama, untuk tujuan yang sama, untuk mencapai manfaat bisnis dengan maksud mencapai efisiensi dan efektifitas.

Menurut Cordery Dkk dalam Febrian (2016:202) mengatakan bahwa *Collaborative Governance* adalah sebuah proses yang dimana didalamnya melibatkan aktor yang terkait untuk menjalankan kepentingan masing masing instansi untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Balogh dalam Febrian (2016::202) *Collaborative Governance* adalah sebuah proses dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan berbagai stakeholder yang konstruktif baik berasal dari tatanan pemerintah atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan yang dimana tujuan itu tidak dapat dicapai apabila dilakukan oleh satu individu saja.

Mengatakan Sambodo, (2016:95), *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisah mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja yang semakin baik dengan tujuan mendapatkan sumberdaya guna melakukan pembangunan yang diharapkan para pemangku kepentingan tersebut. Sumberdaya tersebut berada dan dimiliki pemangku kepentingan tersebut.

*Collaborative Governance* menurut Jung dalam Kurniasih, Dkk (2017:3) merupakan proses pembentukan, mengemudian, memfasilitasi, dan memonitor

pengaturan organisasi lintas sector dalam penyelesaian masalah kebijakan publik yang tidak dapat hanya diselesaikan oleh satu instansi atau organisasi tetapi dilakukan oleh beberapa pihak untuk di selesaikan.

Menurut Utami (2018:2) *Collaborative Governance* merupakan adanya suatu perjanjian atau kerjasama dimana satu atau lebih kapasitas publik atau stakeholder dalam proses pembuatan keputusan kolektif dan bersifat formal, berdasarkan consensus, dan bersifat deliberatif yang bertujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, atau manajemen program asset asset publik. Tindakan ini merupakan proses pembentukan siklus, dengan adanya interaksi yang memerlukan komunikasi yang baik, pemahaman bersama yang dilakukan dengan adanya penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, serta kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.

Emerson dalam Purnomo, Dkk (2018:13), mengatakan *Collaborative Governance* merupakan proses dan struktur dari pengambilan kebijakan publik dalam tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat, swasta, NGOs, dari berbagai istitusi dan level yang ada untuk menentukan tujuan bersama yang sulit untuk dirumuskan sendiri. Sedangkan menurut Mc Guire dalam Purnomo, Dkk (2018:13) *Collaborative Governance* adalah konsep didalam manajemen pemerintah sebagai proses fasilitas dan pelaksana oleh berbagai istitusi baik pemerintah, masyarakat, maupun NGOs yang bertujuan menyelesaikan masalah bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi pemerintah.



Sufianti, (2014:80) mengatakan perencanaan dalam *Collaborative Governance* sangat perlu karena dalam perencanaan adalah proses pembuatan keputusan dimana berbagai pemangku kepentingan, yang melihat berbagai permasalahan dari berbagai sudut, duduk bersama untuk menggali perbedaan antara mereka secara konstruktif, untuk kemudian mencari solusi, dan untuk mendapatkan lebih dari apa yang diperoleh jika hanya mencari solusi dari pemikiran sendiri sendiri. Perencanaan *Collaborative Governance* merupakan perencanaan berbasis komunikasi.

Gunton Dan Day dalam Sufianti, (2014:81) cenderung mengaitkan perencanaan *Collaborative* dengan negosiasi, mengemukakan tiga fase yaitu Pra negosiasi, negosiasi, pasca negosiasi.

Fase Pra negosiasi meliputi :

- a. Persiapan.
- b. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang akan berpartisipasi pada kolaborasi.
- c. Menyiapkan draf aturan aturan dasar, proposal, tujuan, prosedur, peran dan tanggung jawab, jadwal dan logistic.
- d. Mengidentifikasi fakta fakta dan informasi yang relevan yang diperlukan dalam proses.

Fase negosiasi :

- a. Mengidentifikasi kepentingan pemangku kepentingan dan menggunakan prosedur seperti memetakan ide untuk mengidentifikasi pemikiran pemikiran yang luas.

- b. Membungkus pilihan pilihan dan mendorong prinsip prinsip dalam negosiasi dalam sebuah dokumen tunggal yang mencatat status diskusi.
- c. Menyatukan kelompok kelompok kedalam sebuah kesepakatan dan menyakinkan bahwa semua perwakilan menyetujui kesepakatan tersebut.

Fase Pasca negosiasi :

- a. Mendapatkan persetujuan untuk kesepakatan yang telah dicapai untuk mempermudah pelaksanaanya.
- b. Menciptakan proses monitoring untuk mengevaluasi implementasi yang diikuti dengan negosiasi ulang yang mungkin di perlukan dengan perubahan situasi.

Bahwa membangun Sistematika dalam *Collaborative*, Pemerintah dan masyarakat/LSM, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi Faktor-Faktor penghambat *Collaborative* (Pitri 2016:10). Masalah yang terjadi dalam *Collaborative* antara Pemerintah dan masyarakat/LSM, minimnya Pendanaan dari Pemerintah dan kurangnya kesadaran dari Pihak-Pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan Sistematikal *Collaborative* (Pitri 2016:11). dalam Membangun suatu hal perlu melakukan Kerjasama atau *Collaborative*, yang mebagi dalam 3 bentuk Kerjasama/ *Collaborative* yang disebut dengan triple aliace yaitu Kerjasama antara Modal, Pemerintah Daerah, borjois lokal.

#### 1. Bentuk *Collaborative* antara Modal

Artinya dengan dilakukankan *Collaborative* Badan Pemerintah serta beberapa Organisasi dan Tokoh Masyarakat didalamnya biasanya adanya Modal

sehingga Kerjasama antara beberapa Instansi yang terkait didalamnya mendapat pasokan guna kelancaran pencapaian hasil yang ingin dicapai.

## 2. Bentuk *Collaborative* Pemerintah Daerah

Kolaborasi didalam ruang lingkup Pemerintahan, Pemerintah Daerah ada kalanya melakukan tindakan Kerjasama atau *Collaborative* dengan Masyarakat atau beberapa Organisasi apabila hal itu dapat memudahkan pencapaian hasil yang ingin dicapai oleh Instansi-Instansi yang terkait di dalamnya.

## 3. Bentuk *Collaborative* Borjois Lokal

Adalah bentuk *Collaborative* yang dicirikan oleh kepemilikan Modal, dan kelakuan yang terkait dengan kepemilikan, artinya Wewenang lebih besar dipegang oleh Orang yang Modalnya lebih besar dalam dilakukannya Kerjasama dalam bentuk Borjois Lokal

Seigler dalam Kurniasih, Dkk (2017:3) menyampaikan delapan prinsip utama dalam penerapan *Collaborative Governance* :

1. Warga harus turut dilibatkan dalam produksi barang publik.
2. Masyarakat harus mampu memobilisasi sumberdaya dan aset untuk memecahkan masalah publik.
3. Tenaga professional harus berbagi keahlian mereka dengan untuk memberdayakan warga masyarakat.
4. Kebijakan harus menghadirkan musyawara publik.
5. Kebijakan harus mengandung kemitraan kolaborasi yang berkelanjutan.
6. Kebijakan harus strategis.

7. Kebijakan harus mengandung akuntabilitas.
8. Kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik.

Menurut Sudarmo, (2017:52) alasan munculnya dan berkembangnya *Collaborative Governance* sebagai alternatif :

1. Pemikiran pemikiran yang semakin luas tentang pluralisme kelompok kepentingan.
2. Adanya kegagalan kegagalan akuntabilitas manajemen terutama manajemen yang semakin dipolitisasi dan kegagalan implementasinya.

Menurut Ulfa, (2018:9-10) Tahapan membentuk *kolaboratif* sebagai berikut :

1. Dialog tatap muka.

Dialog tatap muka merupakan proses awal untuk membentuk kesepakatan dalam kolaborasi yang dilakukan dan melakukan pembahasan terkait teknis kerjasama.

2. Peninjauan Lokasi

Peninjauan lokasi dilakukan untuk memastikan lokasi dan memastikan kesesuaian rencana pembangunan.

3. Pembangunan.

Pembangunan merupakan proses inti dari sebuah program dimana dalam pembangunan semua aspek atau pihak sangat dibutuhkan untuk bekerja sama.

4. Penyerahan asset.

Penyerahan asset adalah pelestarian dan perawatan untuk pembangunan yang telah dilakukan tidak hancur atau rusak setelah dibangun atau direvitalisasi.



Ansell dan Gash dalam Fairuza (2017:6-7), berpendapat bahwa dalam kolaborasi terdapat komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain komponen itu sebagai berikut.

1. Dialog tatap muka

Dialog tatap muka adalah langkah awal dari sebuah kerjasama karena pada tahap ini akan membicarakan tentang rencana sebuah kegiatan

2. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid.

3. Komitmen terhadap proses

Komitmen dalam proses merupakan komponen yang sangat penting dalam kolaborasi, komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam berkolaborasi.

4. Sikap saling memahami

Sikap saling memahami dapat diartikan sebagai pemahaman bersama untuk saling menutupi setiap kekurangan aktor yang terlibat didalam kolaborasi.

Menurut Dabbie Roberts Dkk dalam Fairusa (2017:7-8), terdapat lima kunci kolaborasi yakni sebagai berikut

1. Tujuan umum

Visi bersama adalah kunci kolaborasi yang akan membawa para aktor tetap bersama dalam mencapai tujuan

2. Mutualitas



Mutualitas terjadi ketika masing-masing pihak memberikan kontribusi sumber daya sehingga pihak lain memperoleh manfaat, kesamaan misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi pertukaran sumberdaya

### 3. Lingkungan yang memungkinkan

Lingkungan kolaboratif terdiri dari lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan pemimpin kolaborasi. Lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja para aktor dalam menjalankan kolaborasi

### 4. Kepercayaan

Kepercayaan adalah salah satu faktor yang paling mendasari keberhasilan kolaborasi. Kepercayaan didasarkan pada keyakinan bahwa para aktor akan jujur dalam perjanjian dan mematuhi komitmen mereka dan tidak mengeksploitasi pihak lain.

### 5. Karakteristik pribadi tertentu

Dalam sebuah kolaborasi para aktor harus terbuka dan mampu memahami motif dan kepentingan aktor lain.

## C. Permukiman kumuh

### 1. Pengertian permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman adalah keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang

tebatas, rawan penyakit social dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasaranan lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya, (Fitria dan Setiawan,2014:1).

Menurut Johan Silas dalam Oktaviansyah, (2012:142), permukiman kumuh adalah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kotas sehingga timbul kompetinsi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh. Menurut Ridlo (2001:22) permukiman kumuh merupakan kampung atau perumahan liar yang perkembangannya tidak direncanakan terlebih dahulu yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah sampai sangat rendah, memiliki kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tinggi dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun akses pelayanan yang kurang baik.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah beserta kondisi hunian masyarakat dalam kawasan tersebut sangat buruk. Rumah beserta sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik pada standar kebutuhan, persyaratan rumah sehat, kepadatan bangunan, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Jawes, 2011:21).

Kawasan permukiman kumuh menurut Budiharjo (Mardhanie, 2013:4) adalah lingkungan hunian dalam kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain; berada dilahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, luas

lahan yang terbatas dengan kepadatan bangunan sangat tinggi, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan serta kualitas bangunan yang sangatlah rendah, prasarana lingkungan yang tidak memadai seperti saluran drainase, prasarana sampah yang membahayakan para penghuninya. Permukiman kumuh juga sering disebut permukiman liar karena pembangunannya yang tidak resmi (liar) dilahan kosong pada kota yang merupakan milik pemerintah ataupun swasta, yang dihuni oleh orang yang miskin karena tidak memiliki akses untuk kepemilikan lahan tetap. Menurut Srinivas, istilah permukiman liar telah ada sejak masa pembangunan diprakarsai negara Barat (Malau, 2013:40).

Munculnya kawasan permukiman kumuh merupakan suatu indikasi kegagalan program perumahan yang terlalu berpihak pada produksi rumah langsung terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menenga ke atas, dan prioritas program perumahan pada rumah milikdan mengabaikan potensi rumah sewa. Program pemberdayaan masyarakat didalam menyediakan rumah yang layak bagi dirinya sendiri belumlah dilaksanakann dengan optimal. Kosentrasi program pada rumah milik telah mengabaikan realitas ptensi rumah sewah sebagai salah satu alternative pemecahan masalah perumahan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi rendah. (Sueca,2004:93).

## 2. Penyebab munculnya permukiman kumuh

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota menurut Suparlan (Jawas, 2011: 22) adalah:

- a. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi.

Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong para pendatang untuk mencari kehidupan yang lebih baik di perkotaan. Dengan keterbatasan keterampilan, pengetahuan, dan modal, serta adanya persaingan yang begitu ketat di antara sesama pendatang maka para pendatang tersebut hanya bisa tinggal dan membangun rumah dalam kondisi yang sangat minim di perkotaan. Pada sisi lain bertambahannya jumlah pendatang yang terus meningkat menyebabkan pemerintah tidak lagi mampu menyediakan hunian rumah yang layak.

b. Faktor bencana.

Faktor bencana juga dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik itu bencana alam seperti misalnya gempa, banjir, longsor, gunung meletus maupun bencana akibat perang atau perkelahian antar suku juga bisa menjadi penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat.

Menurut Syam,(2017:20-36), penyebab tumbuh kembanya permukiman kumuh di suatu wilayah adalah:

1. Faktor urbanisasi dan migrasi penduduk.
2. Faktor lahan perkotaan.
3. Faktor sarana dan prasarana.
4. Faktor social ekonomi.
5. Faktor social budaya.

6. Faktor tata ruang.
7. Faktor aksesibilitas.
8. Faktor pendidikan.
3. Ciri-ciri permukiman kumuh

Seperti yang dikemukakan oleh Suparlan (Jawas, 2011: 22) bahwa ciri-ciri permukiman kumuh adalah:

1. Kondisi fasilitas umum yang kurang dan tidak memadai.
2. Kondisi bangunan rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuni yang tidak mampu atau miskin.
3. Tata ruang mencerminkan adanya kesemrawutan dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya dilihat dari tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh.
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri pada batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
  - 1) Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
  - 2) Satuan komunitas tunggal.
  - 3) Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terbentuk dari sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya memiliki mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang bermacam-



macam, begitu pun dengan asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan pada kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda.

6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau memiliki mata pencaharian tambahan di sektor informil.

#### 4. Penataan permukiman kumuh

Penataan kawasan kumuh adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah yang masig menempati hunian yang tidak layak. Peremajaan permukiman kumuh sangat penting dalam usaha memberi bantuan program dan kegiatan dari pemerintah yang sifatnya pendorong untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya program-program yang bersifat simulative. (Ramdani dan Haryanto, 2013:569).

Menurut Masrul dalam Ramdani dan Haryanto, (2013:571). Mengatakan bahwa penataan kawasan perkumukiman kumuh harus memperhatikan beberapa aspek:

1. Perlunya keselarasan terhadap pembangunan untuk kepentingan pribadi dan umum.
2. Perlunya memperhatikan tata air, budaya, serta kepentingan umum.
3. Perlunya peningkatankialitas lingkungan dan kawasan.
4. Perlunya program pemanfaatan kawasan dengan cara revitalisasi bangunan, penanganan air bersih, dan penaganan limbah air dan sampah.

5. Perlunya penataan bangunan serta penghijauan wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman pasal 112 mengatakan bahwa peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh dilakukan dengan pola penanganan sebagai berikut :

1. Pemugaran, kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman layak huni.
2. Peremajaan, kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
3. Permukiman kembali, kegiatan pemindahan masyarakat setempat yang lebih layak untuk ditempati untuk bertempat tinggal.

Beberapa pola penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang Berbasis Kawasan (Kementrian Perumahan Rakyat, 2012) adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan, yaitu usaha untuk menambah kualitas dengan kegiatan rehabilitasi yang sifatnya tidak mendasar, tidak menyeluruh, dalam rangka penataan kawasan hunian sehingga menjadi hunian yang layak. Sesuai dipergunakan untuk penanganan permukiman kumuh rendah hingga sedang.
- b. Peremajaan, yaitu usaha untuk menambah kualitas dengan kegiatan perombakan pada perubahan yang mendasar serta penataan yang menyeluruh dalam kawasan hunian yang tidak layak huni tersebut. Peremajaan merupakan

suatau bentuk bantuan program yang diberikan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman. Sesuai dipergunakan untuk penanganan permukiman kumuh tinggi (KT).

c. Pemukiman kembali, yaitu upaya menempatkan atau memindahkan permukiman pada lokasi yang berbeda yang secara khusus disediakan. Diprioritaskan bagi permukiman yang menempati tanah negara atau rawan bencana. Sesuai dipergunakan untuk penanganan permukiman kumuh tinggi (KT).

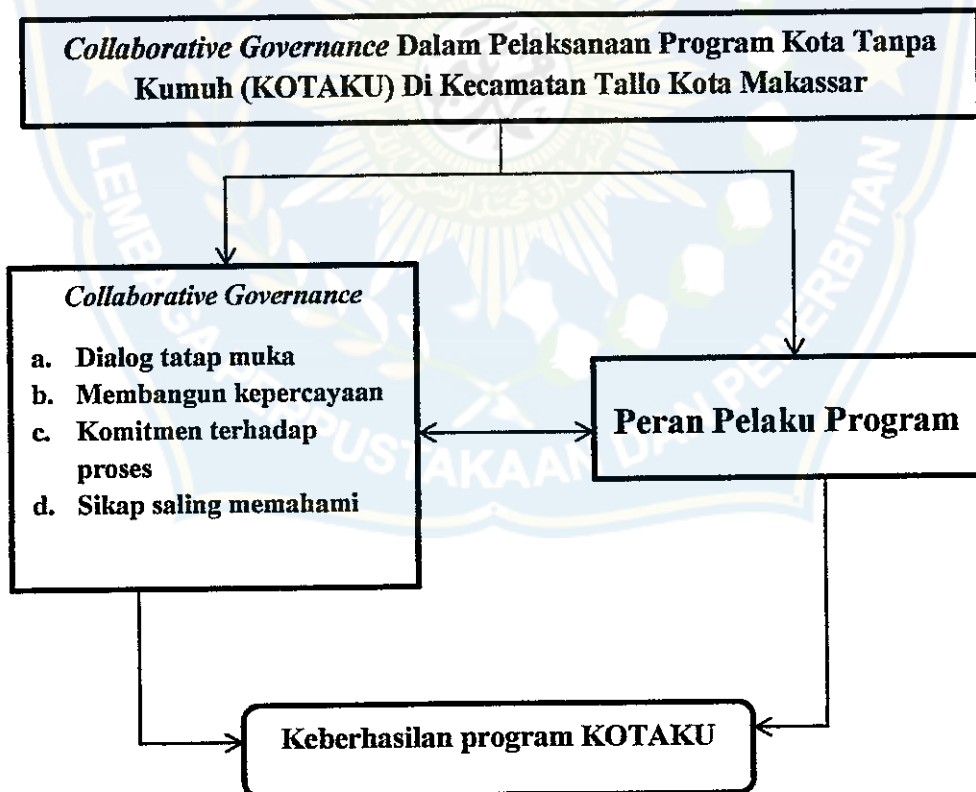
d. *Land Sharing*, yaitu penataan kembali diatas tanah dan lahan sesuai tingkat kepemilikan masyarakat yang sangat tinggi, masyarakat akan memperoleh lagi lahannya dengan luas yang sama sesuai dengan yang dimiliki selama ini secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan terhadap prasarana umum. Sesuai untuk kawasan kumuh dengan tingkat kepemilikan sah cukup tinggi, tingkat kekumuhan tinggi namun tata letak permukiman tidak berpola. Sesuai dipergunakan untuk penanganan permukiman kumuh tinggi (KT)

*Land Consolidation (LC)*, yaitu penataan ulang diatas tanah yang telah dihuni tetapi tingkat penguasaan lahan belum sah ditangan masyarakat cukup tinggi, tata letak permukiman tidak/kurang berpola dalam pemanfaatan yang beragam, berpotensi pada pengembangan menjadi kawasan fungsional yang lebih strategis, dan mungkin adaanya *mix use*.

#### D. Kerangka Pikir

*Collaborative Governance* pada pelaksanaan program (KOTAKU) sangat penting untuk menunjang keberhasilan program pemerintah pusat dalam penanganan permukiman kumuh di kota Makassar. Program KOTAKU sendiri merupakan program pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang untuk menjaga kondisi lingkungan perkotaan. Dalam menunjang *Collaborative Governance* ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan menurut Ansell dan Gash (2007) yaitu : Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan sikap saling memahami.

Gamabar 2.2 Bagan kerangka pikir



### E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah *Collaborative Governance* Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

### F. Deskriptif Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian ini, maka dapat dikemukakan deskriptif fokusnya yaitu :

1. kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama antara unit atau instansi untuk melaksanakan tugas tertentu agar satu sama lain saling membantu mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Dialog tatap muka artinya adanya pertemuan antara *stakeholder* untuk membahas segala instrument yang diperlukan dalam sistem berkolaborasi secara langsung.
3. Membangun kepercayaan Diartikan sebagai semua pihak yang berada dalam ruang lingkup sistem berkolaborasi harus saling mempercayai antara semua pihak dan saling terbuka antara masing-masing *stakeholder*.
4. Komitmen terhadap proses Komitmen masing-masing *stakeholder* artinya setiap hal yang dikeluarkan dalam ruang lingkup berkolaborasi berupa pencapaian hasil harus di sepakati dan pegang teguh sampai hasil yang diinginkan tercapai.
5. Sikap saling memahami Semua pihak yang terkait atau berada dalam ruang lingkup sistem berkolaborasi harus saling memahami antara satu lembaga



atau organisasi dengan lembaga yang lainnya, saling menutupi dan memenuhi hal yang dibutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karna hasil yang ingin dicapai telah di sepakati secara bersama.

6. Peran Pelaku Program Dalam *Collaborative Governance* Pada Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 Bulan. Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Kelurahan Kalukubodoa, alasan penentuan Lokasi Di Kelurahan Kalukubodoa terkait secara langsung dengan *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.

##### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.(Sugiyono: 2014).
2. Tipe penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data primer yaitu hasil yang diperoleh melalui Observasi, wawancara, dokumen dan interaksi secara langsung dengan lingkungan tempat objek penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan atau dokumentasi atau berhubungan dengan objek penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang paling tahu tentang masalah yang akan di teliti, namun jumlah untuk informan penelitian yang mendalami masalah dalam penelitian ini dianggap terlalu banyak sehingga peneliti mengambil informan melalui teknik *Purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1 data informan**

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Ridwan Kurniawan	RK	Staf Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	1
2	Andi Herni	AH	KORKOT I Fasilitator KOTAKU Kota Makassar dan Maros	1
3	Muh.Dahlan Hafid	DH	Senior Fasilitator KOTAKU Kota Makassar dan Maros	1
4	Zainal Abidin, S Sos	ZA	Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa	1
5	Muh.Said	MS	Kordinator BKM Kelurahan Kaluku Bodoa	1
6	Syamsuddin Pakki	SP	Anggota KSM Kelurahan Kaluku Bodoa	1
7	Saddang	SD	Masyarakat	1
8	Acing	AC	Masyarakat	1
Jumlah				8

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan Data adalah cara-cara operasional yang ditempuh oleh Peneliti untuk memperoleh Data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu Penelitian tergantung pada Data Obyektif. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan sebagai alat pengambil Data. Dalam Penelitian ini Teknik Pengumpulan Data yang diperlukan adalah:

1. Observasi yaitu suatu Teknik Pengumpulan Data dan Informasi yang dilakukan dengan cara Pengamatan dan Pencatatan secara Sistematis terhadap

gejala, Peristiwa dan Aspek-Aspek yang akan diteliti di Lokasi Penelitian. Obsevasi ini digunakan untuk Penelitian yang telah direncanakan secara Sistematis tentang bagaimana Bentuk Teknik Pengumpulan Data ini digunakan untuk mendapatkan Informasi secara langsung dalam mempelajari *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar, beserta Bagaimana Peran Pelaku Program Dalam *Collaborative Governance* Pada Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar, dan sekaligus sebagai *Cross Check* atas kebenaran Informasi yang diperoleh dari Informan.

2. Wawancara adalah proses memperoleh Keterangan untuk Tujuan Penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si Penanya dengan si Penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara). Tujuan Peneliti menggunakan metode ini adalah, untuk memperoleh Data secara jelas dan Konkret tentang, *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar, beserta Bagaimana Peran Pelaku Program Dalam *Collaborative Governance* Pada Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan



peristiwa yang sudah lalu dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita media *online*,

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data hasil Penelitian dianalisis dengan menggunakan Model *Miles* dan *Huberman* yaitu Aktivitas Analisis Data Kualitatif dilakukan secara Interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga Datanya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat ditandai dengan tidak diperolehnya lagi Data atau Informasi baru. Aktivitas dalam Analisis meliputi:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi Data berarti Merangkum, Memilih Hal-Hal Pokok, Memfokuskan pada Hal-Hal yang penting, serta dicari Tema dan Polanya. Dengan demikian Data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah Peneliti untuk melakukan Pengumpulan Data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

##### **2. Display Data (Penyajian Data)**

Setelah Data di Reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan Data. Dalam Penelitian Kualitatif Penyajian Data dilakukan dalam Bentuk uraian Singkat, Bagan, Hubungan antar Kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan Data dalam Penelitian Kualitatif adalah dengan Teks yang bersifat Naratif. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan Bukti-Bukti kuat yang mendukung tahap Pengumpulan Data berikutnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah tahap penarikan Kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan Verifikasi Data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan Bukti-Bukti yang mendukung tahap Pengumpulan Data berikutnya. Proses untuk mendapatkan Bukti-Bukti inilah yang disebut sebagai Verifikasi Data. Apabila Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh Bukti-Bukti yang kuat dalam arti Konsisten dengan Kondisi yang ditemukan saat Peneliti kembali ke Lapangan maka Kesimpulan yang diperoleh merupakan Kesimpulan yang Kredibel.

Langkah Verifikasi yang dilakukan Peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan Data, walaupun Data tersebut adalah Data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian Peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara Data yang mempunyai makna dengan Data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam Analisis lebih lanjut seperti Absah, Berbobot, dan Kuat sedang Data lain yang tidak menunjang, Lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu Data dapat dinilai melalui beberapa Metode, yaitu :

- a. Mengecek *Representativeness* atau Keterwakilan Data.
- b. Mengecek Data dari pengaruh Peneliti.
- c. Mengecek melalui Triangulasi.
- d. Melakukan pembobotan Bukti dari Sumber Data-Data yang dapat dipercaya.

- e. Membuat Perbandingan atau Mengkontraskan Data
- f. Menggunakan Kasus Ekstrem yang direalisasi dengan makna Data Negatif.

Dengan Mengkonfirmasi makna setiap Data yang diperoleh dengan menggunakan Satu cara atau lebih, diharapkan Peneliti memperoleh Informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya Tujuan Penelitian. Penarikan Kesimpulan Penelitian Kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa Deskripsi atau Gambaran suatu Objek yang sebelumnya Remang-Remang atau gelap menjadi jelas setelah di Teliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau Interaktif, bisa juga berupa Hipotesis atau dugaan sementara.

#### **G. Keabsahan Data**

Salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam pengujian kredabilitas data adalah dengan triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono, (2013: 273-274) diartikan sebagai pengecekan kembali data dari berbagai sumber dengan berbagai tahap dan berbagai waktu. Lebih lanjut lagi Sugiono membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

##### **1. Triangulasi Sumber**

Trigulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dengan beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan menguji data yang telah didapatkan dengan hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan

hasil pengamatan dari wawancara dan membandingkan hasil wawancara terhadap dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi Teknik

Trigulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut mendapatkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain, dalam memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga biasa mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari disaat sumber masih segar, belum ada masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melalui pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dengan waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka harus dilakukan dengan berulang-ulang sehingga dapat ditemukan kepastian datanya. Trigulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskrip atau Karakteristik Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Wilayah Kecamatan Tallo**

Kecamatan Tallo merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kota Makassar yang terletak sebelah utara Kota Makassar. Dari catatan sejarah, Kecamatan Tallo merupakan peninggalan sejarah yang fundamental dengan keberadaan Kompleks Makam Kuno Raja-Raja Tallo dimana sejarah Kota Makassar tak lepas dengan sejarah Kerajaan Tallo dimana awal Kota dan bandar makassar berada di muara sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada dibawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, yang bahkan menyerang dan menaklukan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar

Hubungan Makassar dengan Dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari

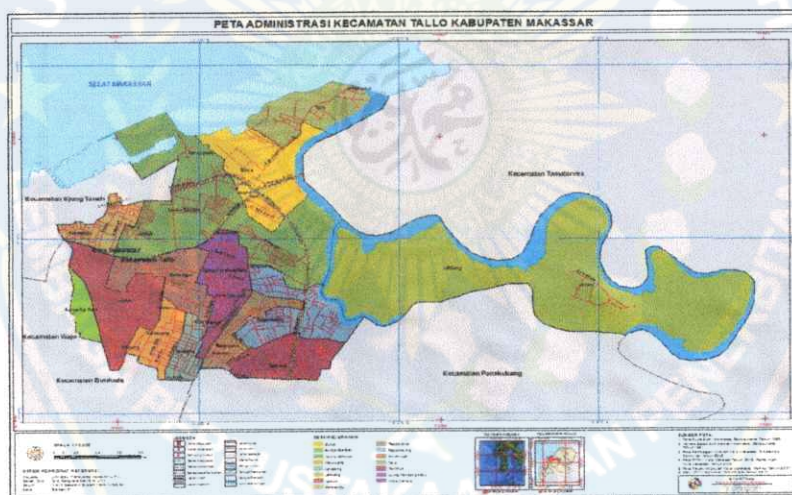


Minangkabau Sumatera Barat yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Gowa ke-XIV I-MANGNGARANGI DAENG MANRABIA dengan gelar SULTAN ALAUDDIN (memerintah 1593-1639), dan dengan Mangkubumi I-MALLINGKAANG DAENG MANYONRI KARAENG KATANGKA yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini, yang mulai memeluk Agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 Nopember 1607, tepatnya hari Jum'at, diadakanlah sembahyang Jum'at pertama di Mesjid Tallo dan dinyatakan secara resmi penduduk Kerajaan Gowa-Tallo telah memeluk Agama Islam, pada waktu bersamaan pula, diadakan sembahyang Jum'at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000, yang sebelumnya hari jadi kota Makassar jatuh pada tanggal 1 April.

Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah Kelurahan terbanyak (15 Kelurahan), dengan luas wilayahnya 8,71 Km<sup>2</sup> atau 4,37% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk 132.695 jiwa dengan kepadatan penduduk 11,48% per Km<sup>2</sup>. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi <500 m di atas permukaan laut. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena Kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke permukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan

laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Dilihat dari segi stabilitas pantai dapat dikatakan relative stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

**Gambar 4.2 Peta Adminitrasi Kecamatan Tallo Kota Makassar**



Sumber : Staf Kecamatan Tallo Tahun 2016

Masyarakat yang agamis merupakan ciri masyarakat Kecamatan Tallo, yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan Makassar Tidan Rantasa (MTR). Masyarakat kecamatan tallo bersama Pemerintahnya serta Pihak Swasta senantiasa bahu membahu dalam kegiatan Pembangunan serta kemasyarakatan melalui kegiatan Kerja Bakti rutin, kegiatan Pembangunan Jalan

maupun masjid secara swadaya, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis serta sosial yang tinggi diantara masyarakat, Pemerintah maupun Pihak Swasta.

**TABEL 4.1 LUAS AREAL JUMLAH RT/RW, RTG, DAN PENDUDUK SE-KECAMATAN TALLO**

No	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	RT	R W	JUMLAH RTG	PENDUDUK		
						L	P	JUMLAH
1	Bunga Eja Beru	0.30	31	5	2.581	4.846	5.118	9.964
2	Lembo	0.33	32	5	2.915	5.541	5.511	11.132
3	Kalukuang	0.41	26	5	1.311	2.596	2.577	5.173
4	La'Latang	0.46	28	4	1.046	1.820	1.891	3.711
5	Rappo Jawa	0.16	41	5	1.844	3.309	3.357	6.666
6	Tammua	0.92	27	6	2.459	5.022	4.960	9.982
7	Rappokalling	0.89	39	5	3.783	7.706	5.987	13.693
8	Wala-Walayya	0.11	37	5	2.047	3.439	3.517	6.956
9	Ujung Pandang Baru	0.41	19	5	1.135	1.880	1.847	3.727
10	Suangga	0.50	29	6	2.457	4.867	4.961	9.986
11	Pannampu	0.46	44	6	4.561	8.539	8.275	16.814
12	Kalukuboda	0.89	51	7	5.201	7.975	9.255	17.230
13	Buloa	0.61	27	6	1.953	4.060	3.992	8.052
14	Tallo	0.61	26	5	2.064	5.008	4.936	9.944
15	Lakkang	1.65	8	2	261	486	958	1.444
	<b>Jumlah</b>	<b>8.71</b>	<b>465</b>	<b>77</b>	<b>296.357</b>	<b>552.608</b>	<b>1024.184</b>	<b>134.474</b>

Sumber Data Primer Tahun 2016 (Seksi Pemerintahan, Kinerja Lurah dan RT/RW)



Dari data di atas, tampak bahwa Kelurahan Lakkang dengan luas 1,65 km<sup>2</sup>, dan kelurahan yang memiliki luas terkecil yaitu Kelurahan Wala-walayya dengan luas 0,11 km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk yang terbanyak untuk kecamatan Tallo berada di Kelurahan Kalulubodda 17.320 jiwa dan untuk yang paling sedikit adalah Kelurahan La'talang dengan jumlah 3.711 jiwa.

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### Visi

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan Visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek.

Dengan memperhatikan Visi Kota Makassar tahun 2014-2019 yaitu "Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua"

Untuk menjabarkan Misi, Kecamatan Tallo dengan potensi wilayah yang di miliki maka dirumuskan Visi Kecamatan Tallo 2014-2019 sebagai berikut :

"Mewujudkan Kecamatan Tallo sebagai pelayan publik yang ramah untuk semua "

Dua pernyataan Visi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Tallo yaitu:

1. Pelayan Publik yang Ramah: Kecamatan Tallo sebagai pelayan Publik yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat akan mengedepankan

pelayanan yang ramah, nyaman dan cepat dalam pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Visi ini dikaitkan dengan program Walikota Makassar yaitu Sombere dan Smart City, maka diharapkan seluruh aparat Kecamatan dan Kelurahan harus menerapkan Pelayanan yang ramah untuk semua.

2. Untuk Semua : sebagai pelayan publik yang ramah, pemerintah kecamatan Tallo sesuai tugas dan fungsinya dapat melayani semua masyarakat tanpa membedakan status sosial baik perorangan maupun kelompok, dengan visi ini diharapkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat seiring sejalan dalam membangun Kecamatan Tallo dan Kota Makassar dua kali tambah baik.

#### Misi

Kecamatan Tallo sebagai perangkat daerah Kota Makassar dapat menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar sesuai tugas dan fungsinya, maka dirumuskan misi pemerintah Kecamatan Tallo sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik yang cepat dan ramah
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui UKM
3. Peningkatkan Kualitas Lingkungan yang asri dan nyaman

#### Tujuan

- 1) Meningkatnya pelayanan publik.
- 2) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.



### 3) Meningkatnya kualitas lingkungan.

#### Sasaran

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatnya disiplin aparatur.
4. Meningkatnya SDM aparatur kecamatan dan kelurahan.
5. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Meningkatnya kebersihan dan keindahan lingkungan
7. Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan
8. Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan
9. Meningkatnya UKM melalui fasilitasi pelayanan KBT
10. Meningkatnya infrastruktur kecamatan dan kelurahan.
11. Meningkatnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.
12. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan

#### 2. Program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh )

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan mengembangkan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35,291 Ha<sup>2</sup> permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir semua wilayah yang ada di Indonesia sesuai

hasil perhitungan yang dilakukan oleh direktorat Jendral Cipta Karya. Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten /Kota, karena selain merupakan masalah, disisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai tingkat Kelurahan/Desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak dalam kolaborasi dapat memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mencapai kota layak huni.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh di tahun 2019, Direktorat Jendral Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program KOTAKU mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di daerahnya.

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/Kota di 34 Propinsi yang menjadi "*platform* kolaborasi" atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem terpadu untuk menangani permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi "*platform* kolaborasi" yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35,291 Ha yang dilakukan diseluruh daerah di Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Tujuan program ini adalah bagaimana meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antaranya sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh

- 2) Terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman ( pokja PKP ) ditingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.
- 3) Tersusunnya secara penanganan permukiman kumuh tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program tersebut antaranya diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengurangan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan.
  - a) Drainase
  - b) Air bersih
  - c) Pengelolaan sampah

- d) Pengelolaan air limbah
  - e) Pengamanan kebakaran
  - f) Ruang terbuka publik
- 2) Menurunnya luas permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.
  - 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP ditingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU.
  - 4) Penerima manfaat puasa dengan kualitas infratraktur dan pelayanan di permukiman kumuh
  - 5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

Penerapan program KOTAKU di kota Makassar pada tahun 2016 yang dimana program KOTAKU diharapkan mampu untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar, yang dimana kawasan kumuh yang di kota Makassar mencapai 47,62 kilometer persegi yang berada hampir semua kecamatan salah satunya di Kecamatan Tallo khususnya di Kelurahan kaluku Bodoa. Kota Makassar sendiri telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat selama tiga tahun berturut turut dalam penanganan permukiman kumuh, dan untuk Kelurahan Kaluku Bodoa telah mendapatkan bantuan yang ketiga kalinya untuk mengurangi kawasan kumuh.

Dalam penerapan program KOTAKU di Kelurahan Kaluku Bodoa berfokus pada tiga jenis pengerjaan yang ingin dilakukan yaitu oerbaikan Drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pengerjaan air bersih untuk warga di



kelurahan kaluku bodoa, yang dimana untuk pengerjaan jalan paving blok ditargetkan 895,45 m<sup>2</sup>, sedangkan untuk Pekerjaan Rehab Drainase dan Penutup Plat di tergetkan 1.911,3 m<sup>2</sup>, dan untuk Pengerjaan Air Bersih di targetkan 2 unit yang terdiri dari 6 RT dan satu RW, yang di tergetkan rampung akhir tahun 2019.

**B. Bentuk *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.**

*Collaborative Governance* merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai stakeholder dengan kepentingan berbeda untuk menciptakan visi yang sama dalam menyelesaikan masalah, membangun kesepakatan mengenai sebuah persoalan, menciptakan solusi untuk persoalan tersebut, dengan mengedepankan nilai kebersamaan untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak atau stakeholder. Dalam *Collaborative Governance* ada beberapa aspek yang harus di perhatikan untuk menunjang keberhasilan sebuah program yaitu : Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan sikap saling memahami.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya (SE EDJCK) No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, mengamanatkan dalam penanganan permukiman kumuh dan menciptakan kawasan layak huni agar kiranya untuk berkolaborasi. Dimana dalam kolaborasi tersebut diharapkan peran pemerintah daerah dan masyarakat bisah saling bersinergi untuk menangani kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak huni, produktif dan berkeanjutan.

Berikut adalah hasil wawancara terkait dengan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Kalukubodoa Kecamatan Tallo yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Fasilitator, BKM, KSM, dan masyarakat.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap pihak yang terkait dengan *Collaboratife Governance* dalam pelaksanaan Progra KOTAKU :

### 1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka artinya adanya pertemuan atau diperadakanya pertemuan secara langsung untuk membahas suatu masalah secara individu atau kelompok, guna mendapatkan solusi terbaik, dan membahas segala instrumen yang akan dilakukan dalam proses *Collaboratife Governance*. Berikut hasil kuitpan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang menjelaskan tentang di peradakanya Dialog tatap dalam program KOTAKU, bapak RK sebagai berikut :

“Untuk dialog tatap muka sering dilakukan, dalam pertemuan ini membahas tentang sosialisasi dalam penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU agar kawasan tersebut tetap aman, bersih dan indah, tempat peremuan itu selalu ditentukan oleh BKM. Ada pertemuan yang di adakan sertiap bulan ada juga diadakan setiap tahun dan pertemuan ini dihadiri semua pihak yang terkait dalam program KOTAKU.”( hasil wawacara dengan RK, 21 juni 2019 ).

Dari wawancara diatas dengan pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Staf Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase, Dan selaku Kordinator Program KOTAKU untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, bahwa dialog tatap muka diadakan untuk mensosialisasikan tentang

program KOTAKU agar masyarakat dan semua pemangku kepentingan tau tentang program KOTAKU, di dalam Sosialisasi ini dijelaskan tentang tujuan dari program KOTAKU yang dimana program ini diharapkan untuk mampu mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Tallo sehingga warga yang ada di daerah tersebut bisa hidup sehat dan jauh dari kawasan yang tidak layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa dalam program tersebut memang melibatkan semua stakeholder untuk mendengarkan sosialisasi terkait dengan penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU.

Hal tersebut di perkuat oleh wawancara dengan senior fasilitator Program KOTAKU bapak DH sebagai berikut :

“Pertemuan atau Dialog tatap muka merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah program yang dimana dalam program ini pertemuan adalah wadah untuk Fasilitator nantinya melakukan sosialisai tentang Program KOTAKU baik dalam perencanaan maupun perawatan dari program, di dalam pertemuan juga menjadi wadah untuk menyatukan sebuah visi dan mencari solusi jika dalam pelaksanaan dari program terjadi sebuah masalah, untuk pertemuannya terkadang kadang Cuma diadakan di ruang terbuka maupun di Aula kantor Lurah”( hasil wawancara dengan bapak DH, tanggal 4 juli 2019 ).

Dari hasil wawancara dengan bapak DH selaku Senior Fasilitator Program KOTAKU, menunjukkan bahwa Dialog tatap muka atau pertemuan merupakan sebuah hal yang sangat penting karena langkah awal dari pelaksanaan program itu adalah adanya pertemuan untuk mensosialisasikan program yang ingin dilaksanakan. Selain menjadi tempat untuk mesosialisasikan sebuah program yang ingin dilaksanakan, Dialog tatap muka juga menjadi tempat untuk menyatukan visi dan mencari solusi jika pelaksanaan dari sebuah program tidak sesuai yang diharapkan. Menyatukan visi dalam pelaksanaan program sangat penting agar

setiap stakeholder tau apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program nantinya, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dari terjadinya kesalahan dalam penerapan dari tujuan yang ingin dicapai.

Dari wawancara diatas lebih di perkuat dengan pernyataan dari Kordinator BKM untuk kelurahan Kalukubodoa bapak MS tentang Dialog tatap muka yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi, hasil wawancara tersebut yaitu:

“Pertemuan program KOTAKU sering kita adakan untuk membahas berbagai hal mulai dari perencanaan sampai pengerjaan dan perawatan, dalam setiap pertemuan juga akan dibahas langkah kedepanya agar Program KOTAKU berjalan sesuai yang diharapkan, untuk pertemuannya sendiri itu kami adakan beberapa kali ada yang tiap minggu, tiap bulan dan setiap akhir tahun” (Hasil wawancara dengan bapak MS selaku Kordinator BKM kelurahan Kalukubodoa, tanggal 4 juli 2019).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya Dialog tatap muka merupakan hal terpenting dalam program KOTAKU selain sebagai wadah untuk sosialisai mengenai program yang ingin dilakukan, Dialog Tatap Muka juga merupakan wadah untuk membahas mengenai perencanaan yang ingin dilakukan terhadap pelaksanaan program KOTAKU, dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Kaluku Bodoa mereka merencanakan tiga fokus pengerjaan yang dimana mereka merencanakan perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan penyediaan air bersih yang terdiri dari jalan paving blok ditargetkan  $895,45 \text{ m}^2$ , sedangkan untuk Pekerjaan Rehab Drainase dan Penutup Plat di tergetkan  $1.911,3 \text{ m}^2$ , dan untuk Pengerjaan Air Bersih di targetkan 2 unit yang terdiri dari 6 RT dan satu RW, yang di tergetkan rampung akhir tahun 2019.



**TABEL 4.2 Rencana kerja program KOTAKU Kelurahan Kalukubodoa tahun 2019**

No	Jenis pengerjaan	Lokasi pengerjaan	Volume	Jenis kegiatan
1	Jalan paving blok	RT001-RW004	340,00 m <sup>2</sup>	REHAB
	Jalan paving blok	RT002-RW004	165,00 m <sup>2</sup>	REHAB
	Jalan paving blok	RT007-RW004	100,00 m <sup>2</sup>	REHAB
	Jalan paving blok	RT009-RW004	54,49 m <sup>2</sup>	REHAB
	Jalan paving blok	RT003-RW004	74,95 m <sup>2</sup>	REHAB
	Jalan paving blok	RT006-RW004	161,00 m <sup>2</sup>	REHAB
2	Drainase dan penutupan plat	RT001-RW004	722,00 m <sup>2</sup>	REHAB
	Drainase dan penutupan plat	RT002-RW004	473,36 m <sup>2</sup>	REHAB
	Drainase dan penutupan plat	RT007-RW004	67,00 m <sup>2</sup>	REHAB
	Drainase dan penutupan plat	RT009-RW004	76,00 m <sup>2</sup>	REHAB
	Drainase dan penutupan plat	RT003-RW004	250,94 m <sup>2</sup>	REHAB
	Drainase dan penutupan plat	RT006-RW004	322 m <sup>2</sup>	REHAB
3	Pekerjaan Air bersih	RT001-RW004	1,00 m <sup>2</sup>	BARU
	Pekerjaan Air bersih	RT009-RW004	1,00 m <sup>2</sup>	BARU

*Sumber dari fasilitator KOTAKU Tahun (2019)*



Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh anggota KSM kelurahan Kalukubodoa ketika dilakukan Wawancara sebagai berikut :

“Kalau berbicara mengenai Dialog Tatap Muka untuk program KOTAKU sering diadakan yang dimana diadakan di Aulah Kantor Lurah dihadiri oleh semua pihak, yang biasanya membahas mengenai sosialisasi, perencanaan kedepannya, dan hasil yang telah dicapai sampai tentang bagaimana masyarakat mampu untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program KOTAKU”.(hasil wawancara dengan anggota KSM kelurahan Kalukubodoa dengan bapak SP, tanggal 4 juli 2019).

Dari pernyataan di atas tentang Dialog tatap muka dapat disimpulkan bahwa sejatinya menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah *Collaborative Governance* dimana pertemuan adalah wadah untuk menyatukan sebuah visi untuk mencapai sebuah program, didalam sebuah program hal yang utama adalah sebuah pertemuan dimana dalam pertemuan itu akan membahas terkait tentang apa tujuan dari sebuah program dan langkah kedepannya.

Sedangkan hasil wawancara dari bapak AC terkait dengan dialog tatap muka sebagai berikut:

“Kalau pertemuan ada dan sering diadakan dan tempatnya di Aulah kantor Lurah, dalam pertemuan itu membahas tentang program KOTAKU, kami selaku masyarakat diminta untuk ikut aktif menjadi pelaku dari program itu baik itu dalam pengerjaan dan keberlanjutannya itu program”. (hasil wawancara dengan bapak AC , tanggal 04 juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan bapak AC selaku warga kelurahan Kaluku Bodoa bahwa pertemuan itu adalah wadah untuk menyampaikan kepada masyarakat akan fungsi mereka dalam sebuah program yang dimana masyarakat sebagai subjek dan objek dari program KOTAKU itu sendiri sehingga masyarakat harus mampu menjaga dan melestarikan daerahnya ketika program ini dilaksanakan. Peran dari masyarakat sendiri mereka dijadikan sebagai pekerja

atau tukang dalam pengerjaan pisik dari program ini salah satu contohnya adalah pengerjaan paving blok atau jalan lingkungan itu di kerjakan oleh masyarakat yang ada sekitar proyek pengerjaan, hal ini dilakukan agar rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungannya tinggi.

Dari hasil wawancara dari berbagai pihak menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *collabrative Governance* program KOTAKU sangat penting diadakannya sebuah pertemuan untuk mensosialisasikan program yang akan diadakan serta membahas terkait perencanaan sampai bagaimana masyarakat mampu menjaga fasilitas yang diberikan, serta Dialog Tatap Muka juga dilakukan untuk menyatukan visi dan langkah-langkah dalam pengerjaan agar tidak ada kekeliruan dalam proses pengerjaan dari proyek yang dikerjakan. Hal ini sesuai dengan konsep dari Samatupang Dan Sridharna dalam Arrozzaq (2016:5), perlunya sebuah pertemuan mempersatukan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai masalah, menciptakan solusi terhadap masalah tersebut, dan mengedepankan nilai nilai kebersamaan untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak.

Berikut adalah agenda Dialog Tatap Muka sebagai berikut :

**TABEL 4.3 Agenda dialog tatap muka**

No	Agenda Dialog	Masalah yang dibahas	Pihak yang terkait	Ket
1	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tentang Perencanaan penanganan permukiman kumuh</li> <li>Sosialisasi program KOTAKU</li> <li>Peran masyarakat dalam perawatan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Daerah</li> <li>BKM</li> <li>Faskel</li> <li>KSM</li> <li>Masyarakat</li> </ul>	Terlaksana
2	Rapat Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah yang ingin dikerja</li> <li>Program perencanaan</li> <li>Perencanaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Daerah</li> <li>BKM</li> <li>Faskel</li> <li>KSM</li> <li>Masyarakat</li> </ul>	Terlaksana
3	Evalusai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Daerah</li> <li>BKM</li> <li>Faskel</li> <li>KSM</li> <li>Masyarakat</li> </ul>	Terlaksana

Sumber dari BKM Kelurahan Kaluku Bodoa Tahun (2019)

## 2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan diartikan sebagai semua pihak yang berada dalam *Collaborative Governance* harus saling mempercayai antar semua pihak keterbukaan masing-masing stakeholder dalam memberikan masukan konsep penggabungan terkait permasalahan yang ingin dicapai. Berikut hasil kutipan

wawancara dengan beberapa informan terkait dengan membangun kepercayaan dalam prinsip *Collaborative Governance* sebagai berikut :

“Untuk membangun kepercayaan antar stakeholder dalam sebuah program itu dengan melibatkan langsung masyarakat dimana yang mengerjakan adalah masyarakat baik sebagai tukang, buruh, dan yang menjaga juga masyarakat memelihara dan yang menikmati juga masyarakat, dalam hal ini pemerintah setempat tidak melibatkan pihak ketiga atau kontraktor, dan yang paling penting itu anggaran itu langsung kita berikan ke BKM untuk mengelolanya artinya ada transparansi dalam anggaran”(hasil wawancara dengan bapak RK pada tanggal 21 juni 2019 ).

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program KOTAKU untuk Membangun kepercayaan itu dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam pengerjaanya dan tidak melibatkan pihak ketiga, tidak adanya pelibatan pihak ketiga dilakukan agar kepercayaan dari pada masyarakat dapat terjalin dan mau untuk membantu baik dalam pengerjaan sampai keberlanjutan dari program ini, melibatkan secara langsung masyarakat sangat menjadi salah satu dari tujuan program ini agar masyarakat tau akan pentingnya untuk menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan indah, hal ini sesuai dengan konsep dari Dabbie Roberts dalam Fairus yang mengatakan kepercayaan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah kolaborasi.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak ZA selaku kepala Kelurahan Kalukubodoa bahwa:

“Membangun kepercayaan dalam Program KOTAKU itu dimana pemerintah langsung memberikan wewenang kepada masyarakat dan badan keswadayaan masyarakat (BKM) untuk mengerjakan proyek tersebut agar tidak adanya kecurigaan misalnya ketika dilorong A diadakan pengerjaan jalan dengan pemasangan paving maka BKM



kelurahan berkordinasi dengan masyarakat yang ada dilorong itu untuk langsung mengerjakan tanpa menyewa tukang dari luar”(hasil wawancara dengan bapak ZA pada tanggal 5 juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa kehadiran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan dalam pengerjaan program KOTAKU, dimana kehadiran dari masyarakat sendiri dimaksudkan agar masyarakat tidak menaruh rasa curiga kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan dari program KOTAKU, didalam membangun kepercayaan terhadap masyarakat tidaklah mudah, salah satu cara agar rasa percaya masyarakat terhadap sebuah program dapat terjalin yaitu mengikut sertakan atau mengundang masyarakat untuk terlibat langsung dari program mulai dari tahapan awan sampai dengan tahap akhir.

Senada dengan pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan bapak MS selaku Kordinator BKM kelurahan Kaluku Bodoa sebagai berikut:

“Dalam hal membangun kepercayaan harus ada dalam proyek ini salah satu contohnya dengan menjadikan masyarakat sekitar sebagai pekerja baik dalam pengerjaan drainase atau pengerjaan jalan lingkungan” (hasil wawancara dengan bapak MS selaku Kordinator BKM kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).

Dari pernyataan tersebut mengenai *collaborasi governance* untuk membangun kepercayaan itu pelibatan masyarakat secara penuh agar tidak adanya kecurigaan masyarakat kepada semua pihak, dengan seperti itu masyarakat sendiri akan lebih sadar untuk menjaga lingkungannya kedepan karena pelibatan mereka secara penuh. Hal tersebut dilakukan agar prinsip dari kolaborasi itu berjalan, yang dimana adanya kepercayaan antara setiap stakeholder.



Sedangkan pernyataan dari fasilitator program KOTAKU oleh ibu AH selaku Kordinator Program KOTAKU untuk wilayah Makassar dan Maros sebagai berikut :

“Dalam hal Membangun kepercayaan dengan sering melakukan komunikasi yang intens terhadap semua pihak yang terlibat dalam sebuah program, hal ini dilakukan agar kepercayaan dari semua pihak terjalin.” (hasil wawancara dengan ibu AH, tanggal 25 juni 2019 ).

Dari hasil pengamatan diatas dengan ibu AH selaku kordinator program untuk Wilayah Makassar dan Maros bahwa tentang Collaborative Governance dalam pelaksanaan program KOTAKU dalam hal Membangun kepercayaan dalam program ini dengan menjalin komunikasi yang intens terhadap semua pihak, komunikasi yang dilakukan untuk saling berkordinasi terhadap semua pihak terkait dengan apa yang telah tercapai dan hal apa yang menjadi kendala dilapangan, selain komunikasi melalui telepon juga dilakukan komunikasi langsung ke masyarakat dengan turun langsung untuk berinteraksi.

Hasil wawancara dengan pihak KSM Kelurahan Kalukubodoa menyatakan bahwa:

“Dalam hal Membangun kepercayaan dengan transparansi antara semua pihak yang terlibat. Kami selaku pihak KSM selalu berusaha untuk transparan dalam pengelolaan anggaran yang kami dapatkan dengan langsung berkordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam program KOTAKU” (wawancara dengan bapak SP selaku anggota KSM kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).

Dari pernyataan bapak SP selaku anggota KSM Kelurahan Kalukubodoa dalam membangun kepercayaan yang dimana membangun kepercayaan sangat penting, salah satu langkah yang dilakukan dengan transparan dalam pengelolaan anggaran agar semua pihak tidak saling curiga. Dalam melakukan transparansi

dari sebuah anggaran menjadi hal yang sangat sensitif karena salah sedikit langsung dihadapkan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan Konsep *collaborative governance* dalam membangun kepercayaan dengan transparansi yang dilakukan KSM kepada semua pihak dalam pengelolaan anggaran.

Sedangkan wawancara dengan bapak SD selaku masyarakat Kalukubodoa yang mengatakan bahwa :

“Membangun kepercayaan dalam program KOTAKU itu kami selaku masyarakat di percaya langsung untuk mengerjakan proyek dan pihak dari KSM juga selalu transparan kalau ada mau di beli bahan untuk pengerjaan jalan paving dan drainase” (hasil wawancara dengan bapak SD selaku masyarakat kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).

Pernyataan dari bapak SD selaku masyarakat kelurahan Kalukubodoa tentang membangun kepercayaan dalam proses *Collaborative Governance* membuktikan bahwa membangun kepercayaan sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan pelibatan penuh masyarakat baik dari proses pengerjaan maupun dengan penjagaan kedepannya.

Dari hasil wawancara dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* program KOTAKU dalam Membangun kepercayaan sangatlah di perlukan agar semua pihak saling percaya satu sama lain. Dimana dalam pelaksanaan program KOTAKU semua pihak yang ada dalam pelaksanaan program ini saling percaya dalam menjalankan program ini agar tumbuh sebuah kesadaran dari untuk tetap menjaga lingkungan tempat tinggal agar yaman. Hal ini sesuai dengan konsep *collaborative* yang dimana perlunya sebuah kepercayaan semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama.

### 3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses artinya setiap hal yang dikeluarkan dalam ruang lingkup *Collaborative Governance* berupa saran dan pencapaian hasil secara bersama harus disepakati dan dipegang teguh sampai pencapaian hasil yang di inginkan. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dalam hal berkomitmen terhadap proses dalam sistem *Collaborative Governance* sebagai berikut:

Berikut hasil kutipan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang menjelaskan tentang Komitmen terhadap proses di program KOTAKU, bapak RK sebagai berikut :

“Bentuk komitmen dari Pemerintah itu dengan siap untuk menjalankan program penanganan kawasan kumuh agar kawasan kumuh yang ada dikawasan Makassar bisah diatasi satunya dengan berkomitmen menjalankan program KOTAKU di tingkat kabupaten/Kota sesuai dengan tujuan dan rencana yang ingin dicapai dari program tersebut”. (hasil wawancara dengan bapak RK pada tanggal 21 juni 2019 ).

Dari hasil pernyataan dinas pekerjaan umum kota makassar bentuk komitmen dengan siap untuk menjalankan atau melaksanakan program pemerintah pusat dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU, Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah serius dalam melaksanakan atau menjalankan sebuah program yang di instruksikan oleh pemerintah pusat, adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mejalankan program KOTAKU sangat diperlukan agar pelasaannya bisah berjalan dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan konsep kolaborasi yang dimana diperlukan sebuah komitmen agar pelaksanaan kolaborasi itu bisah maksimal.

Sedangkan fasilitator program KOTAKU mengatakan bahwa bentuk Komitmen terhadap proses adalah:

“Bentuk komitmen terhadap program KOTAKU itu dengan seruis untuk menjalankan semua proses mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan sehingga tujuan program KOTAKU dapat tercapai” ( hasil wawancara dengan bapak DH tanggal 4 juli 2019 ).

Dari hasil wawancara dengan bapak DH bahwa berkomitmen dalam sebuah program harus ditanamkan dalam prinsip kolaborasi baik itu dari tahapan awal sampai dengan tahapan untuk menjaga agar tujuan dari sebuah program itu dapat tercapai sesuai dengan harapan awal dicetuskannya program. Berkomitmen dalam sebuah proses kolaborasi menjadi sebuah prinsip utama agar dalam pelaksanaannya setiap *stakeholder* bersungguh sungguh mencapai tujuan yang diinginkan yang dimana di tarketkan kawasan kumuh menjadi 0% di daerah Kota Makassar.

Sedangkan kordinator BKM kelurahan kaluku bodoa mengatakan bahwa bentuk komitmen terhadap proses sebagai berikut:

“Komitmen dari BKM dalam menjalankan program KOTAKU menjalankan semua aturan yang termuat dari pedoman program dan petunjuk program agar dalam pelaksanaan nantinya tidak terdapat kekeliruan dalam program tersebut sehingga bisah berjalan sesuai yang di rencanakan” (hasil wawancara dengan bapak MS selaku Kordinator BKM kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).

Dari penjelasan diatas oleh bapak MS selaku kordinator BKM dapat dianalis bahwa berkomitmen dalam sebuah proses harus ada karena itu yang dapat membuat program tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan. Dimana Jika BKM mampu berkomitmen terhadap petunjuk dan pedoman program KOTAKU



maka akan mencapai hasil yang diinginkan. Hal inilah yang akan membuat tujuan dari program KOTAKU berjalan sesuai dengan yang ingin dicapai.

Sedangkan penjelasan dari KSM kelurahan kaluku bodoa menjelaskan bentuk komitmen terhadap proses sebagai berikut:

“Bentuk komitmen yang dijalankan oleh KSM sendiri itu menjalankan aturan yang ada pada KSM termasuk perjanjian untuk bersungguh-sungguh menjalankan Proyek pengerjaan dan siap menerima sanksi apabila dalam pelaksanaan program KSM melakukan kesalahan baik itu dari penyalagunaan wewenang atau penyalagunaan anggaran” (hasil wawancara dengan anggota KSM kelurahan Kalukubodoa dengan bapak SP pada tanggal 4 juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk komitmen dari KSM sendiri dengan menjalankan perjanjian dan bersungguh sungguh untuk menjalankan tugas dimana dalam perjanjian itu sendiri mengharuskan KSM agar mampu membantu menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan siap menerima sanksi apabila terjadi sebuah penyalagunaan wewenang dalam program KOTAKU. Hal ini menunjukkan bahwa dari KSM sendiri siap untuk berkomitmen terhadap sebuah proses dalam sudah di tetapkan agar program itu sendiri bisah berjalan sesuai dengan tujuan program KOTAKU.

Sedangkan hasil wawancara terhadap masyarakat menjalankan tentang komitmen terhadap proses sebagi berikut:

“Kami akan berkomitmen dalam program KOTAKU agar wilayah kami bisah lebih nyaman dan lebih aman di tinggali, salah satu bentuk komitmen kami dengan betul betul mengerjakan proyek pengerjaan jalan peping ini dengan setulus hati kami karena kami ingin melihat agar wilayah kami indah dan aman” (wawancara dengan bapak SD selaku masyarakat kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).



Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa komitmen masyarakat di tunjukkan dengan keseriusan mereka mengerjakan jalan yang menjadi proyek dari program KOTAKU, hal ini dikarenakan mereka juga ingin merasakan infrastruktur yang memadai seperti jalan akses menuju kawasan mereka dan sistem drainase yang baik agar kawan mereka bebas banjir, hal ini ditandai dengan mereka bergotong royong untuk mengerjakan pembuatan drainase dan membantu pemasangan paving.

Dari hasil wawancara dari berbagai pihak dapat di simpulkan bahwa dalam sebuah kolaborasi harus adanya prinsip agar masing-masing pihak mampu bertanggung jawab terhadap tugas atau peran yang didapatkan, yang mana dari semua pihak dalam program KOTAKU mau untuk berkomitmen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar dalam penyelenggaraan program ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berkomitmen terhadap sebuah Kolaborasi bukanlah hal yang mudah, Perlunya rasa tanggung jawab yang besar terhadap sebuah program agar pihak yang terlibat mampu berkomitmen terhadap tugas dan fungsinya.

Berikut adalah pencapaian dari program KOTAKU di kelurahan Kaluku Bodoa dimana pengerjaannya dimulai pada akhir bulan Juni 2019 dan di targetkan rampung akhir 2019:

**Tabel 4.4 Pencapaian hasil program KOTAKU**

No	Jenis pengerjaan	Lokasi pengerjaan	Target awal	Proses	Ket
1	Jalan paving blok	RT001-RW004	340,00 m <sup>2</sup>	100,98 m <sup>2</sup>	30,65%
	Jalan paving blok	RT002-RW004	165,00 m <sup>2</sup>	47,45 m <sup>2</sup>	
	Jalan paving blok	RT007-RW004	100,00 m <sup>2</sup>	33,00 m <sup>2</sup>	
	Jalan paving blok	RT009-RW004	54,49 m <sup>2</sup>	24,54 m <sup>2</sup>	
	Jalan paving blok	RT003-RW004	74,95 m <sup>2</sup>	33,67 m <sup>2</sup>	
	Jalan paving blok	RT006-RW004	161,00 m <sup>2</sup>	45,32 m <sup>2</sup>	
2	Drainase dan penutupan plat	RT001-RW004	722,00 m <sup>2</sup>	345,00 m <sup>2</sup>	64,02%
	Drainase dan penutupan plat	RT002-RW004	314,00 m <sup>2</sup>	124,67 m <sup>2</sup>	
	Drainase dan penutupan plat	RT007-RW004	67,00 m <sup>2</sup>	35,98 m <sup>2</sup>	
	Drainase dan penutupan plat	RT009-RW004	76,00 m <sup>2</sup>	41,69 m <sup>2</sup>	
	Drainase dan penutupan plat	RT003-RW004	250,94 m <sup>2</sup>	130,00 m <sup>2</sup>	
	Drainase dan penutupan plat	RT006-RW004	322 m <sup>2</sup>	154,92 m <sup>2</sup>	
3	Pekerjaan Air bersih	RT001-RW004	1,00 m <sup>2</sup>	1 unit	35,99%
	Pekerjaan Air bersih	RT009-RW004	1,00 m <sup>2</sup>	1 unit	

Sumber dari fasilitator KOTAKU Tahun (2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui dimana proses pengerjaan program KOTAKU beberapa bulan terakhir sudah mencapai 50%, yang terdiri dari perbaikan jalan lingkungan, drainase dan penyediaan air minum mini. Pencapaian dari program ini tidak terlepas dari keseriusan dari semua pihak untuk berkomitmen menjalankan peran mereka mulai dari proses perencanaan hingga proses pengerjaan di lapangan hingga mencapai hasil yang diinginkan.

#### 4. Sikap Saling Memahami

Semua pihak yang terkait atau berada dalam ruang lingkup sistem *Collaborative Governance* harus saling memahami antara satu lembaga atau organisasi dengan lembaga yang lain, saling memenuhi hal yang dibutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karena hasil yang ingin dicapai telah sepakati secara bersama. Berikut kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dalam hal sikap saling memahami dalam sistem *Collaborative Governance* sebagai berikut :

Berikut hasil kuitipan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang menjelaskan tentang Sikap saling memahami di program KOTAKU, bapak RK sebagai berikut :

“Dinas Pekerjaan umum kota Makassar menyampaikan sikap saling memahami dalam sistem kolaborasi tersebut bahwa setiap lembaga yang ada dalam ruang lingkup sistem kolaborasi di perlukan pemahaman akan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah oleh karenanya diharapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini agar mampu memahami keterbatasan ini sehingga pihak yang lain mampu untuk menutupi keterbatasan itu sehingga kolaborasi itu berjalan dengan baik” (hasil wawancara dengan bapak RK pada tanggal 21 juni 2019 ).

Dari penjelasan diatas oleh Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar dapat di simpulkan bahwa pemerintah Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar mengatan bahwa didalam kolaborasi ini pemerintah daerah memiliki keterbatasan, jadi semua pihak harus mampu memahami keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintah mengharapkan agar keterbatasan itu di pahami dan ditutupi oleh semua pihak yang terlibat agar tujuan dari program itu bisah dicapai dengan baik. Sikap saling memahami sangat di perlukan agar mampu

untuk menutupi keterbatasan dan kekurangan sehingga pelaksanaan dari program .KOTAKU bisah berjalan dengan baik.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak ZA selaku kepala Kelurahan Kalukubodoa bahwa:

“Didalam proses kolaborasi ini kami dari pihak kelurahan berharap semua pihak atau stakeholder saling memahami tugas masing-masing pihak, tidak saling bergantung untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing, tetapi saling menutupi kekurangan dari semua pihak”(wawancara dengan bapak ZA pada tanggal 5 juli 2019).

Dalam pernyataan bapak Lurah kelurahan KalukuBodoa tentang sikap saling memahami bahwa dalam suatu sistem atau ruang lingkup kolaborasi diperlukan sikap saling memahami antara pemerintah ataupun lembaga yang terkait agar kekurangan-kekurangan dalam sistem *berkolaborasi* mampu dipahami serta di tutupi oleh lembaga atau pihak terkait agar kolaborasi berjalan sesuai dengan rencana.

Sedangkan hasil wawancara dengan fasilitator program KOTAKU oleh ibu AH selaku Kordinator Program KOTAKU untuk wilayah Makassar dan Maros sebagai berikut :

“Bentuk dari sikap saling memahami dimana dalam penerapan program KOTAKU kami selaku faskel harus mampu memahami kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat, agar pelaksanaan dari pada program ini sesuai dan tepat sasaran sehingga masyarakat bisah menikmati hasil dari program ini” (hasil wawancara dengan ibu AH pada tanggal 25 juni 2019 ).

Dalam pendapat diatas tentang sikap saling memahami dalam *Collaborative Governance* dimana harus dipahami terlebih dahulu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang jadi tujuan dari program, hal ini sangat



diperlukan agar pelaksanaan sebuah program itu bisah tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga pelaksanaannya nantinya tidak semata-mata sia-sia saja. Sikap saling memahami harus ditanamkan ke semua pihak yang ada dalam ruang lingkup program KOTAKU, agar program ini bisah berjalan seperti semesestinya.

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak BKM Kelurahan Kalukubodoa bahwa:

“Dalam sikap saling memahami sangat diperlukan dalam pelaksanaan program agar semua pihak bisah memahami tugas dan fungsi dari semua pihak yang terlibat dalam program ini, hal ini dimaksudkan agar segala pemangku kepentingan tau bahwa dalam pelaksanaan program ini tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan tetapi semua pihak saling bekerja sama sesuai fungsinya untuk mencapai tujuan bersama” (hasil wawancara dengan bapak MS selaku Kordinator BKM kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Sikap saling memahami dalam pelaksanaan program sangat diperlukan agar semua pihak mampu memahami tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang terlibat dalam program KOTAKU, sikap saling memahami didalam pelaksanaan program dimaksudkan agar tidak terjadi kecenderungan kepada satu lembaga untuk menjalankan pelaksanaan program.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak SD selaku masyarakat Kalukubodoa yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat Kelurahan Kalaukubodoa mengharapkan agar pemerintah lebih memahami lagi terkait dengan keberadaan kami, kami mengharapkan agar program penanganan permukiman kumuh ini lebih mengutamakan daerah yang kawasan kumuhnya luas” (hasil wawancara dengan bapak SD selaku masyarakat kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).



Berdasarkan hasil wawancara diatas dari bapak SD selaku masyarakat kelurahan Kalukubodoa tentang sikap saling memahami dimana pemerintah harus mampu memahami keadaan masyarakat Kalukubodoa terkhusus masyarakat yang berada dalam kawasan yang kumuh berat agar mereka juga bisah merasakan daerah yang layak huni dan tidak kumuh lagi.

Dari hasil wawancara dari berbagai sumber terkait dengan sikap saling memahami dalam Kolaborasi bahwa setiap pihak harus mampu memahami setiap keterbatasan yang dimiliki dalam proses Kolaborasi dan mampu untuk mengisi atau menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga yang terkait dalam kolaborasi program KOTAKU. Didalam pelaksanaan program KOTAKU semua pihak harus mampu memahami terhadap tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder* hal ini sangat penting agar kehadiran dari semua pihak dapat diterima agar colaborasi yang dilaksanakan sampai pada tujuan yang diinginkan.

### **C. Peran Pelaku Program *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tallo Kota Makassar.**

Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuain diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang

menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Dalam proses kolaborasi peranan dari setiap aktor kolaborasi adalah hal yang terpenting karena apabila setiap aktor menjalankan peranannya dengan baik maka suatu program akan berjalan sesuai apa yang diharapkan. Berikut adalah hasil wawancara dengan para pelaku dalam program KOTAKU sebagai berikut:

#### **1. Pemerintah Daerah ( Dinas PU Kota Makassar )**

Pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota memiliki peran dalam program KOTAKU yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan program KOTAKU tingkat Kabupaten/Kota. Berikut hasil kutipan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang menjelaskan tentang peran dalam program KOTAKU, bapak RK sebagai berikut :

“Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam program KOTAKU adalah memastikan RPJMD memuat terkait program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh, mensosialisasikan penyelenggaraan Program KOTAKU kemasyarakat agar masyarakat paham tentang program KOTAKU, melakukan monitoring terhadap pencapaian dari program ini, kami juga mengalokasikan anggaran yang diterima kepada wilayah kerja yang mendapatkan anggaran dan kami juga melakukan koordinasi dengan fasilitator mengenai perencanaan kerja untuk program ini”

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran dari dinas Pekerjaan umum dalam program ini adalah pemerintah harus mampu mensosialisasikan terkait dengan program KOTAKU agar masyarakat mau menerima dan mau ikut berpartisipasi dalam program tersebut, selain untuk mensosialisasikan terkait dengan program KOTAKU pemerintah juga harus memasukkan program KOTAKU kedalam RPJMD agar pelaksanaan dari program

KOTAKU dapat dimonitoring secara langsung oleh pemerintah daerah jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mau turun kemasyarakat untuk mampu mengedukasi dan menjelaskan maksud dan tujuan dari program penanganan permukiman kumuh.

## **2. Tim Kordinator Kota**

Dalam peranannya Tim Fasilitator sendiri harus mampu untuk lider dalam pelaksanaan dari program KOTAKU yang di muat dalam Petunjuk Pelaksanaan program KOTAKU tingkat Kabupaten/Kota. Berikut wawancara dengan Tim Fasilitator mengenai peran dalam program KOTAKU :

“Peranan dari pada tim Fasilitator itu adalah sebagai konsultan pemerintah daerah dan masyarakat untuk kebijakan pengelolah lingkungan dan sosial. selama tahap persiapan, kami juga membantu baik pemerintah daerah maupun BKM dalam perencanaan dalam program KOTAKU serta melaluka monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan program KOTAKU. Kami juga melakukan pelatihan kepada BKM dan KSMterkait pelaksanaan dari program KOTAKU ” ( hasil wawancara dengan bapak DH tanggal 4 juli 2019 ).

Dari apa yang dijelaskan oleh bapak DH dapat di simpulkan bahwa peranan dari tim fasilitator KOTAKU adalah sebagai konsutan dalam perencanaan program KOTAKU serta membantu dari Pemerintah daerah dan BKM untuk mensosialisasikan mengenai program KOTAKU kepada masyarakat dan juga melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan program KOTAKU. Hal ini sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan program KOTAKU tingkat Kabupaten/Kota.

### **3. Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa**

Dalam peranannya pemerintah tingkat kelurahan harus mampu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan di wilayah kerjanya sebagaimana dimuat dalam Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa :

“Peran dari pemerintah kelurahan dalam program KOTAKU adalah memberikan jaminan agar pelaksanaan dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, kami juga memfasilitasi pertemuan yang ingin diadakan terkait dengan pembahasan mengenai program KOTAKU, dan juga berkordinasi dengan BKM, KSM, masyarakat , dan faslitator dalam perencanaan permasalahan permukiman kumuh”(hasil wawancara dengan bapak ZA pada tanggal 5 juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peranan dari pemerintah kelurahan adalah memberikan jaminan agar pelaksanaan program bisah berjalan lancar serta memfasilitasi setiap pertemuan terkait dengan program KOTAKU dan juga memberikan dukungan terkait penyelesaian masalah permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa peranan dari pemerintah kelurahan sangat dibutuhkan untuk memfasiltasi dalam hal pertemuan yang ingin diadakan di tingkat kelurahan dan memberikan motifasi terhadap masyarakat agar mau ikut berprtisipasi dalam proses pengerjaan.

### **4. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

Dalam Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, BKM harus mampu untuk menjalankan perannya sesuai dengan pedoman program KOTAK. Berikut hasil wawancara dengan BKM kelurahan Kaluku Bodoa terkait dengan peranannya :



“Dalam program KOTAKU peranan dari BKM itu sangat urgen karena kami yang terjun langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan lebih detail dari program KOTAKU, kami membuka rekening BKM yang dimana nantinya ketika mendapat anggaran kami yang menerima dan langsung menyalurkannya ke KSM untuk langsung di kerjakan proyeknya, kami juga yang berkordinasi langsung dengan pemerintah daerah dan fasilitator untuk perencanaan mengenai pengurangan permukiman kumuh dan juga memeberikan sangsi kepada KSM apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan dana atau ketentuan yang sudah ditetapkan, dalam perencanaannya kami harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebudayaan masyarakat.” (hasil wawancara dengan bapak MS selaku Kordinator BKM kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).

Dari penyelasan diatas dari wawancara dengan kordinator BKM dapat disimpulkan bahwa peranan dari BKM sangat urgen karena langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program KOTAKU agar dapat diterima baik oleh masyarakat dan juga berkordinasi lansung dengan pemerintah dalam perencanaan pengurangan permukiman kumuh serta memberikan sangsi kepada kelompok swadaya masyarakat apabila terjadi pelanggaran dana atau ketentuan yang sudah ditetapkan.

## **5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

Dalam pelaksanaan program KOTAKU KSM sendiri memiliki peran Yang diatur dalam Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, berikut hasil wawancara dari KSM kelutahan Kaluku Bodoa:

“Kalau berbicara tentang peranan dari KSM itu kami turun untuk memastikan wilayah yang akan dijadikan proyek dari penanganan permukiman kumuh. kami juga membantu BKM dalam penyusunan rencana kerja di sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan juga memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dan paling penting itu kami yang menerima anggaran dan membelanjakan sesuai dengan apa yang ada dalam perencanaan proyek” (hasil wawancara dengan anggota KSM kelurahan Kalukubodoa dengan bapak SP pada tanggal 4 juli 2019).



Dari apa yang di jelaskan oleh bapak SP selaku anggota KSM kelurahan Kalukubodoa menunjukkan bahwa peranan dari pada KSM itu cukup penting karena mereka harus memastikan bahwa dalam perencanaan pengurangan permukiman kumuh itu tidak menghasilkan dampak bagi lingkungan dan sosial bagi masyarakat setempat dan harus transparan dalam penggunaan anggaran yang di dapat untuk penyelesaian dari proyek KOTAKU.

#### **6. Relawan (Masyarakat)**

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan Kaluku Bodoa terkait dengan peran dalam pelaksanaan Program KOTAKU :

“dalam pelaksanaan program KOTAKU masyarakat yang menjadi buruh dari pengerjaan proyek ini seperti pemasangan paving dan drainase itu kami yang mengerjakannya dan kami juga di minta untuk menjaga lingkungan kami agar lebih indah dan nyaman untuk ditinggali” (hasil wawancara dengan bapak SD selaku masyarakat kelurahan Kalukubodoa tanggal 4 juli 2019).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan masyarakat itu sangatlah penting dimana dalam pengerjaan fisik dari proyek itu dilakukan oleh masyarakat dan mengharapkan kepada masyarakat agar mampu menjaga lingkungannya agar tetap indan dan nyaman. Dimana hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan tempat mereka bertahan hidup sehingga tetap nyaman, indah dan yang paling penting adalah jauh dari lingkungan yang tidak sehat..

Dari hasil wawancara dari berbagai sumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program KOTAKU di wilayah Kelurahan kalukubodoa setiap stakehoder memiliki peranannya masing-masing, baik itu pemerintah daerah

sampai dengan masyarakat, dimana peranan mereka saling bersinergi agar dalam pelaksanaan dari program ini bisah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bersama dalam penanganan permukiman kumuh.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas sehingga dapat di simpulkan bahwa bentuk *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Tallo Kota Makassar, dengan bentuk yang dilakukannya seperti indikator-indikator yang terdapat dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka dimana Pertemuan diadakan di aulah kantor Lurah Kaluku Bodoa yang dihadiri semua pihak baik dari pemerintah, fasilitator, BKM, KSM, dan masyarakat. Dimana dalam pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas mengenai program KOTAKU mulai dari perencanaan sampai keberlanjutan dari program KOTAKU.
2. Membangun kepercayaan Dalam sebuah kelaborasi membangun kepercayaan kepada semua pihak yang terkait sangat penting agar tidak tercipta rasa curiga kepada pihak yang terlibat, salah satu cara dengan adanya transparansi kepada semua pihak baik dalam pengelolaan anggaran dan pengerjaan proyek, serta pelibatan secara penuh masyarakat agar masyarakat bisah percaya ketika ada program seperti ini.
3. Komitmen terhadap proses Berkomitmen terhadap proses atau menanamkan rasa komitmen kepada diri sangat perlu agar kita mampu untuk menjalankan tugas kewajiban dengan sungguh-sungguh, dalam kolaborasi juga sangat perlu untuk berkomitmen menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan dan petunjuk dari yang sudah ditetapkan, dimana didalam kolaborasi program

KOTAKU semua pihak berkomitmen untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

4. Sikap saling memahami Sikap saling memahami dalam sistem kolaborasi tersebut bahwa setiap lembaga yang berada dalam ruang lingkup sistem kolaborasi di perlukan sistem pemahaman akan keterbatasan ruang kerja yang dimiliki oleh instansi yang terkait, sehingga sangat diperlukan untuk semua pihak yang terkait untuk menutupi keterbatasan dalam kolaborasi dari program KOTAKU.
5. Peran pelaku *Collaborative Governance* Setiap stakeholder memiliki perannya masing-masing, baik itu pemerintah daerah sampai dengan masyarakat, dimana peranan mereka saling bersinergi agar dalam pelaksanaan dari program ini bisah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bersama dalam penanganan permukiman kumuh.

#### **B. Saran**

Dari pembahasan diatas terkait dengan *Collaboratif Governance* dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kecamatan Tallo Kota Makassar muncul beberapa saran:

Dalam pelaksanaan program KOTAKU ini diharapkan untuk kemudian kepada para pelaku atau Stakeholder untuk mampu bekerjasama dengan lebih baik lagi agar kemudian tujuan dari program ini mengurangi permukiman kumuh sampai 0% bisah tercapai tanpa mencari keuntungan untuk diri pribadi atau kelompok tertentu.

Kemudian disarankan Menjalankan peran sebaik mungkin sesuai dengan aturan-aturan atau pedoman dari pelaksanaan program KOTAKU, adapun ketika ingin menjalankan program ini dengan sebuah inovasi diharapkan semua pihak mengetahui dan sudah di diskusikan. agar kemudian pihak terkait tidak menaruh kecurigaan kepada pihak yang lainnya agar sinergi dari kolaborasi itu tetap terjaga.





### DAFTAR PUSTAKA

- Arrozraq, Dimas Luqito Chusuma, 2016. *Collaborative Governance ( Studi Tentang Kolaborasi anta Stakeholdes Dalam Penganmbangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Adminitrasi Negara FISIP Universitas Airlangga. Diakses 27 september 2018.
- Bateman, Thomas. 2009, *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi Dalam Dunia*. Edisi 7, buku 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Dahlan, Uar Eka. (2016). *Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon*. Jurnal Fikratuna. Vol 8. No.2. (diakses 20 juni 2018).
- Fairuza, Mia, (2017). "Kolaborasi Antara Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Adminitrasi Negara FISIP, Universitas Airlangga.
- Febrian, Ranggi Ade, 2016. *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan ( Tinjauan Konsep dan Regulasi )*. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol. 2 No. 1. Diakses 26 september 2018.
- Fitria, Niken dan Setiawan, Rulli Pertiwi, (2014). *Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat*. Jurnal Teknik Pomits. Vol.3. No.2.
- Fitriani, Bella Makruffi, (2018) . *Kolaborasi Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota*. Jom FISIP Vol.5 Edisi II. Di akses Maret 2018.
- Hadi Wahyono. 2012 Artikel "*Sustainable Development (Pengembangan Berkelanjutan)*"diakses<https://damarlanhadi.Wordpress.com/2012/12/14/sustainable-development>. (diakses 10 Maret 2018).
- Hafidzita, Eka Putri Irvan. (2018) . *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*. Jom FISIP Vol. 5 No. 1 Di Akses Maret 2018.
- Jawes, Dwijo Putro. 2011. *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya*. Jurnal Teknik Sipil Untan. Vol. 11, No. 1.
- Kementrian Perumahan Rakyat, 2012. *Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)*. Jakarta

- Kurniansih, Dkk. 2017. *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas*. Vol. 19. No.1.
- Lailia, Anita Nur, (2014). *Gerakan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jurnal Politik Muda. Vol 3. No.3. (diakses 20 juni 2018).
- Malau, Waston. 2013. *Dampak Urbanisasi terhadap pemukiman kumuh (slum area) di daerah perkotaan*. Vol. 5, No. 2.
- Mardhanie, Afif Bizrie, 2013. *Pemetaan Kawasan Kumuh Permukiman Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan*. Jurnal Inersia Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda. Vol. 5, No. 1.
- Noegroho, Noegi. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan. Studi kasus Kegiatan PLP2K-BK di Kota Medan dan Kota Payakumbuh*. Vol. 3, No. 1 diakses tanggal 10 maret 2018.
- Oktaviansyah, Evans (2012). *Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana di Kelurahan Lingkas Ujung di Kota Tarakan*. Jurnal Tata Kota dan Daerah. Vol, 4. No.2.
- Purnomo, Eko Priyono, Dkk 2018. *Collaborative Governance Dalam Tata Kelolah Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta LP3M UMY.
- Prasetyo, Adi, 2009. *Karakteristik Permukiman Kumuh di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Skripsi Fakultas Geografi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pitri, T.Anisa, (2016). *“Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Provensi Riau”* . Jom Fisip, Volume 4,No.2 Oktober 2016.
- Perturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- Radar, Makassar. 2017. *Percepatan Penataan Permukiman Kumuh*. Diakses tanggal 13 Maret 2018 <http://www.radarmakassar.com/2017/02/27/percepat-penataan-pemukiman-kumuh/>
- Rahardjo, Adisasmita. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Ramdani, Bani Dipra dan Haryanto, Ragil, (2013). *Preferensi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Kumuh di Desa Kurau, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah*. Jurna Tenik PWK Vol. 2. No. 3.
- Rohimat, Dadan Dkk, (2017) . *Paartisipasi masyarakat Dalam Implementasi Program KOTAKU Di kecamatan Ciawi*. Jurnal Governansi Vol. 3 No.2 di akses Desember 2018.
- Rhidlo, M Agung. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*. Penerbit Unissula. Semarang
- Sambodo, Giat Tri, 2016. *Pelaksanaan Collaborative Governance Di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, do Yogyakarta*. Vol. 3 No. 1. Diakses 27 september 2018.
- Sudarmo, Tika Mutiarawati, 2017. *Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pengalongan*. Jurnal Wacana Publik. Vol. 1 No. 2. Diakses 27 september 2018.
- Sueca, Ngakan Putu, (2004). *Permukiman Kumuh, Masalah atau Solusi*. Jurnal Permukiman Natah. Vol. 2 No.2.
- Sufianti, Ely, 2014. *Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non Kolaboratif*. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota. Vol 25 No. 1 . Diakses 27 september 2018.
- Sugiyono. (2014). *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Syam. Muhajir, (2017). Skripsi. *Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganannya pada permukiman di kelurahan Rangkas Kecamatan Banggae kabupaten majene*. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
- Ulfa, Eky, 2018. *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Surabaya*. Jurnal Adminitrasi Negara FISIP Universitas Airlangga. Diakses 27 september 2018.
- Utami, Daniar Rizky, 2018. *Collaborative Governance Dalam Pengendalin Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jurnal Adminitrasi Negara FISIP Universitas Airlangga. Diakses 27 september 2018.

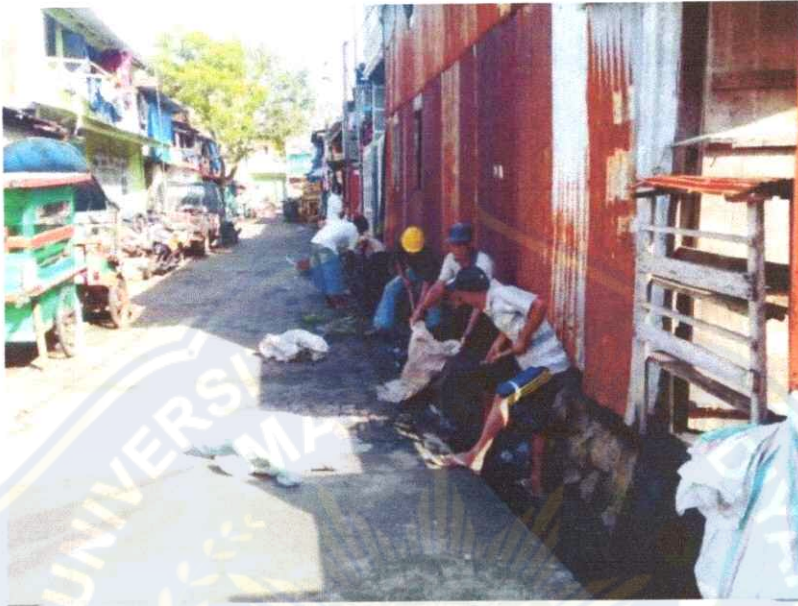
Yolanda, Sylvia, (2018), *Strategi Komunikasi Konsultan Manajemen Wilayah Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota*. Jom FISIP Vol 5. No.1.

Yuliani, Sri Dkk. (2017) . *Kolaborasi Dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Jurnal Wacana Publik. Vol. 1 No. 2 Diakses Maret (2018) .





## Lampiran

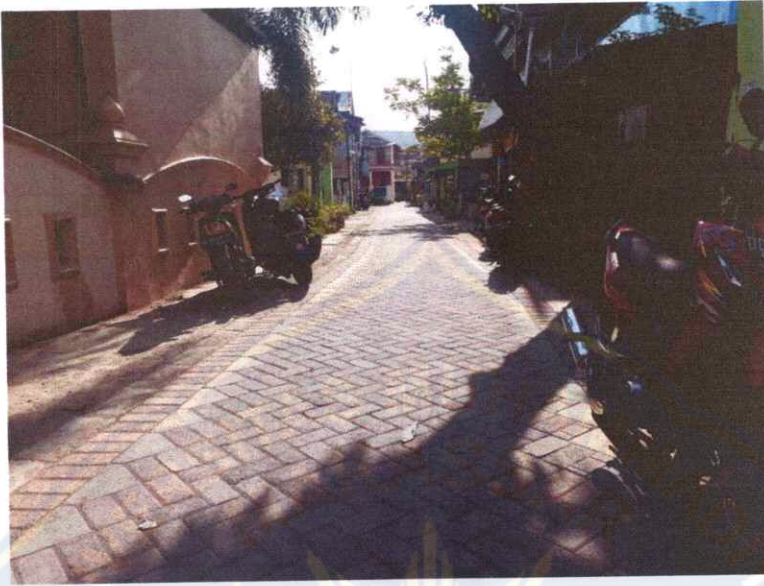


Kondisi salah satu jalan yang ada di Kelurahan Kalukubodoa



Proses pengerjaan Drainase





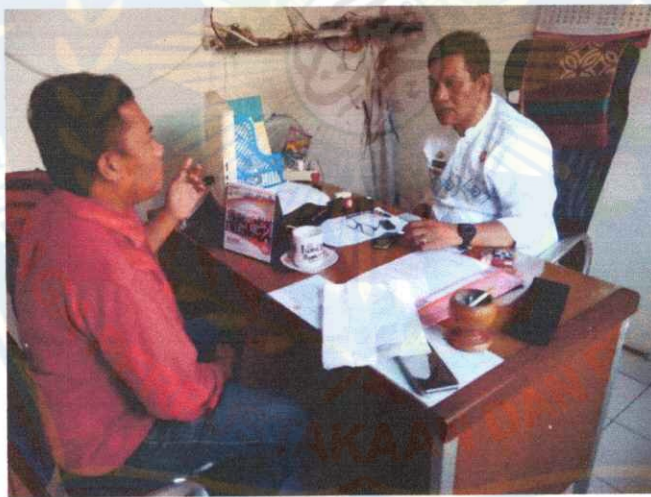
Kondisi drainase dan jalan paving yang telah di kerjakan



Dialog tatap muka program KOTAKU



Wawancara dengan bapak RK, Selaku staf Staf Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar



Wawancara dengan Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa





Wawancara dengan Kordinator Kota program KOTAKU



### Wawancara dengan Senior Fasilitator



Wawancara dengan Kordinator KSM Kelurahan Kaluku Bodoa



Wawancara dengan Kordinator BKM Kelurahan Kaluku Bodoa



Wawancara dengan masyarakat kelurahan Kaluku Bodoa



Wawancara dengan masyarakat kelurahan Kaluku Bodoa



## RIWAYAT HIDUP



**Agussalim**, dilahirkan Lampa Barat tanggal 18 Agustus 1996. Penulis merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara dari buah kasih pasangan **Ayahanda Ismail dan Ibunda Suriani**. Penulis mengawali pendidikan formal mulai pada tahun 2002 di SD Negeri 46 Lampa dan tamat tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanua dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Duampanua dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan S1.

Berkat Rahmat Allah SWT dan iringan doa dari keluarga serta teman-teman. Perjuangan panjang penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul **“Collabotarive Governance Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kecamatan Tallo Kota Makassar”**